

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dalam mencapai visi dan misi organisasi. LAKIP juga merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang atau mandat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat

Purwakarta, 17 Februari 2025
KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 1968062819932007



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah. yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD/APBN wajib Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, serta Permenpan No. 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja yang sesuai dengan TUPOKSI di tiap bidang untuk selanjutnya berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2024. LAKIP didalamnya memuat tentang pencapaian sasaran kinerja, kemudian dievaluasi dan dianalisa, untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan sudah konsisten dengan Rencana Strategis (RENSTRA 2024-2026) dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 dari 6 Indikator Sasaran, Adapun hasilnya sebagai berikut :

TUJUAN I. Meningkatkan Usaha Perikanan, capaian Indikator Kinerja (IK) Tujuan I yaitu terdapat dua IK Sasaran, terdiri dari indikator persentase peningkatan usaha perikanan dan persentase peningkatan pelaku usaha

perikanan. IK persentase peningkatan usaha perikanan dan persentase peningkatan pelaku usaha perikanan. Dari perhitungan Tujuan I pada tahun 2024 dari kedua IK telah direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian untuk Tujuan I mencapai 100% atau 33,33% dari total 6 IK sasaran yang telah ditetapkan. Dari Tujuan I, untuk untuk IK sasaran Persentase peningkatan produksi perikanan tercapai 5,25% sesuai total target yang ditetapkan (5,25%). Sedangkan untuk IK sasaran persentase peningkatan pelaku usaha perikanan mencapai 0,33% sesuai total target yang ditetapkan (0,33%). Untuk pencapaian Tujuan I dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.258.736.048,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.210.651.050,- atau 95,31%.

TUJUAN II. Meningkatkan Produksi Peternakan, terdapat dua IK sasaran, yaitu Meningkatkan produksi peternakan dan Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan keamanan masyarakat, kedua indikator sasaran mencapai target, sehingga untuk Tujuan II mencapai 100% atau 33,33% dari total 6 IK Sasaran yang telah ditetapkan. Dari Tujuan meningkatnya produksi peternakan, prosentase capaian IK Meningkatkan produksi peternakan dari perhitungan target 1,50% yang ditetapkan dapat tercapai sebesar 1,50%. Sedangkan capaian IK Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat tercapai 0 (Nol) kasus sesuai dengan yang ditargetkan. Dukungan anggaran untuk tujuan II dialokasikan sebesar Rp. 2.150.838.978,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.110.466.700,- atau 98,12%.

TUJUAN III. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel, terdapat 2 Indikator sasaran, terdiri dari indikator capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kedua indikator mencapai target, sehingga untuk tujuan III mencapai 100% atau 33,33% dari total 6 IK sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran untuk tujuan III sebesar Rp. 12.095.758.914,- dengan realisasi sebesar Rp.11.105.133.675,- atau 91,81%.

Secara keseluruhan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja selama kurun waktu satu tahun, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kinerja Dinas

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah mencapai target 100 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp. 49.650.000,- dan Retribusi Pasar Hewan sebesar Rp. 96.300.000,- serta Retribusi Penjualan Produksi Hasil perikanan Daerah, berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp. 35.450.000,-. Secara keseluruhan baru tercapai 49,76% dari total target PAD yang ditetapkan tahun 2024 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta yaitu sebesar Rp. 364.564.568,-. Target PAD Tahun 2024 lebih tinggi dari target 2023 yaitu sebesar Rp. 322.264.950,-. Walaupun demikian capaian PAD tahun 2024 sebesar Rp. 181.400.000,- meningkat dari capaian PAD 2023 yaitu Rp. 144.326.000,-.

Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran pada Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta diantaranya keterbatasan jumlah tenaga teknis, medis dan paramedis yang menangani masalah peternakan dan perikanan; belum tertatanya usaha pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Ikan, tempat pemotongan hewan dan unggas skala kecil, pasar yang menjual PAH, olahan PAH dan ikan di Wilayah Kabupaten Purwakarta; menurunnya produksi ikan di perairan umum; serta lalu lintas ternak/hewan yang sangat tinggi sehingga menimbulkan penyebaran penyakit sangat cepat, serangan penyakit ikan disebabkan oleh fluktuasinya suhu perairan dan curah hujan yang tinggi, terbatasnya jumlah maupun mutu induk unggul.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan peternakan (lahan penggembalaan) dan perikanan (kolam budidaya ikan) yang menyebabkan semakin menurunnya lahan pertanian di wilayah Kabupaten Purwakarta. Untuk itu pembangunan perikanan dan peternakan wilayah Kabupaten Purwakarta haruslah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah dicanangkan dengan harapan meski lahan peternakan dan perikanan semakin berkurang namun produksi dan produktivitas ternak dan ikan dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi dan introduksi teknologi secara tepat guna.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
1.5. Sumber Daya Manusia.....	35
1.5.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	35
1.5.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
1.6. Isu Strategis.....	36
1.7. Ringkasan Hasil Evaluasi.....	38
1.8. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	42
2.1. Rencana Strategis.....	42
2.2. Tujuan, sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan.....	44
2.3. Strtegi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan.....	45
2.4. Indikator Kenrja Utama (IKU).....	47
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	48
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
3.1.1. Perbandingann Antara Target Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	57
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	63
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya.....	64
3.1.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah....	67
3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional ...	72
3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi.....	72
3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
3.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	79
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	84
3.3. Pendapatan Daerah.....	93
3.4. Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Sasaran Dinas Perikanan Dan Peternakan Tahun 2024.....	95
BAB IV. PENUTUP	124
4.1. Kesimpulan.....	124
4.2. Saran.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	39
Tabel 2.	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Renstra 2024-2026.	44
Tabel 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Renstra 2024-2026.	45
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.	48
Tabel 5.	Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	49
Tabel 6.	Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	51
Tabel 7.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.	59
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	63
Tabel 9.	Realisasi Kinerja Tahun 2024 serta Capaian Kinerja Strategis pada Tahun-Tahun Sebelumnya.	65
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.	69
Tabel 11.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Bandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional.	72
Tabel 12.	Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan penurunan kinerja serta alternative solusi.....	72
Tabel 13.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
Tabel 14.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Program.....	76
Tabel 15.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	79
Tabel 16.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.	85
Tabel 17.	Target dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.	93
Tabel 18.	Target dan Realisasi Anggaran terkait pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.	95
Tabel 19.	Produksi Ikan Hasil Tangkapan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2024.	102
Tabel 20.	Produksi Ikan Kolam Budidaya (kolam air tenang dan kolam air deras) Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024.	103
Tabel 21.	Produksi Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024.....	104
Tabel 22.	Produksi Benih Ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan 2024.	105
Tabel 23.	Produksi Benih Ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dibandingkan 2024.....	106
Tabel 24.	Produksi Ikan Hias di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan 2024.....	108
Tabel 25.	Jumlah Rumah Tangga dan Nelayan di Kabupaten Purwakarta Menurut Jenis Alat Tangkap Tahun 2023 dibandingkan 2024.....	110
Tabel 26.	Jumlah Rumah Tangga Budidaya Menurut Jenis Budidaya Tahun 2023 dibandingkan 2024.	111
Tabel 27.	Data Kelompok Perikanan Tahun 2023 dibandingkan 2024.	111
Tabel 28.	Jumlah Produksi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2024 (kg).....	113
Tabel 29.	Perbandingan Capaian Kinerja Program Inseminasi Buatan Tahun 2023 dan 2024.	114
Tabel 30.	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024.....	115

Tabel 31. Data populasi ternak, populasi wajib suntik dan hasil vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.	117
Tabel 32. Data Populasi Ternak, Populasi Wajib Suntik Dan Hasil Vaksinasi Anthrax Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.	118
Tabel 33. Rekapitulasi Vaksinasi Rabies di Purwakarta Tahun 2024.	118
Tabel 34. Jumlah Pemasukan Ternak (Lalu Lintas Ternak) Tahun 2024.	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta..	33
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.	35

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Menurut Pangkat/ Golongan.....	35
Grafik 2.	Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Menurut Tingkat Pendidikan.	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan
- Lampiran 2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024-2026
- Lampiran 3. SK Tim Penyusun LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
- Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
- Lampiran 5. Rencana Aksi Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
- Lampiran 6. LHE SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 7. Monitoring Rencana Aksi Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
- Lampiran 8. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024
- Lampiran 9. Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024
- Lampiran 10. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 11. SOP Evaluasi SAKIP Internal Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024
- Lampiran 12. SOP Pengumpulan Data Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024
- Lampiran 13. SOP Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun.

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapanan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta ke

wenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah daerah maupun satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2024 - 2026, yang merupakan

penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan Bupati Purwakarta sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Sebagai dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu periode tertentu, sesuai dengan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, dan menunjukkan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait serta memberikan gambaran mengenai keberhasilan, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan menjadi bukti administratif dan arsip resmi atas kinerja instansi selama satu tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan LAKIP:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakandalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.
2. Memudahkan pihak internal dan eksternal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi.
3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Menjadi bahan masukan untuk menyusun rencana kerja dan strategi pada tahun berikutnya, dengan mengacu pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 245 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2.A Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

a. Kedudukan Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Fungsi

1. Perumusan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
2. Pelaksanaan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Bagan Struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakartan terdiri dari ;

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perikanan Budidaya, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD terdiri dari :
 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) kelas A;

2. UPTD Perikanan Perairan Umum, kelas A;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan, kelas A;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), kelas A;
5. UPTD Pasar Hewan, kelas A;
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, kelas A; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

a. Perikanan tangkap, yang terdiri atas:

1. Pemberdayaan nelayan kecil;
2. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya; dan
3. Pengawasan usaha penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.

b. Perikanan budidaya, yang terdiri atas:

1. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah;
2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

c. Sarana dan prasarana peternakan, yang terdiri atas:

1. Pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
2. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
3. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;

4. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
 5. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 6. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;dan
 7. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
- d. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang terdiri atas:
1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
 3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
 4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;dan
 5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- e. Perizinan pertanian aspek peternakan, yang terdiri dari:
1. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha peternakan, produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 2. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pengecer obat
- Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

- a. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan

- b. Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan dinas;
- c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;

- e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi dan pokok rincian tugas Sekretariat yang berkaitan dengan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Kepegawaian dan Umum sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas, dan Profil Dinas;
- b. Melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- e. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
- f. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
- g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan

asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;

- h. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- i. Mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- k. Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
- m. Mengelola sarana dan prasarana Dinas;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- o. Menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; dan

- p. Menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian. Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Subbagian. Keuangan mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian. Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun dan mengusulkan calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;

- e. Membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honorarium pegawai honorer;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas;
- k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas (pelaksanaannya, diselaraskan dengan kewenangan yang dimiliki Dinas);
- n. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas;
- p. Meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas;

- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan (pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;
- u. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- x. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. Membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan (pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;
- aa. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai pokok rincian tugas, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan proses penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional perikanan tangkap kepada pimpinan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan;
- e. Menilai hasil kajian dan analisis potensi wilayah penangkapan ikan;

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis profesi nelayan kecil;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi data dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap antara kelompok perikanan dengan pihak pemerintahan maupun swasta;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Menilai/mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah Bidang Perikanan Budidaya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya;

- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya yang meliputi kelembagaan usaha perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta produksi perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai pokok rincian tugas, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan proses penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan perikanan budidaya kepada pimpinan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pengembangan kelembagaan usaha perikanan budidaya;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan produksi perikanan budidaya;
- g. Memfasilitasi pengembangan dan perlindungan budidaya perikanan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perikanan budidaya kepada Atasan;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
- k. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai pokok rincian tugas, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan proses penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kepada pimpinan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Menyampaikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak, kemitraan kelembagaan dan sarana prasarana peternakan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta bina usaha peternakan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepada Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.
- e. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Bidang peternakan mempunyai pokok rincian tugas, sebagaimana berikut:
- f. Merumuskan Rencana Kerja Bidang Peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun alokasi sumberdaya dan sumberdana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

- h. Menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengelolaan, pembinaan, pengawasan perbibitan, sarana prasarana pakan ternak serta bina usaha;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan sarana prasarana peternakan dan pakan ternak serta bina usaha peternakan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan sarana prasarana peternakan dan pakan ternak serta bina usaha peternakan;
- k. Memberikan saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan sarana prasarana peternakan dan pakan ternak serta bina usaha peternakan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

UPTD Perikanan Perairan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perairan umum. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan perairan umum;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan perikanan perairan umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan perikanan perairan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD Perikanan Perairan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan perikanan perairan umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan perikanan perairan umum;
- d. Memfasilitasi bimbingan teknis perikanan perairan umum;
- e. Melakukan pemetaan wilayah perikanan perairan umum;
- f. Melaksanakan pemantauan/monitoring lingkungan usaha perikanan di perairan umum;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang Pengembangan Produk Hasil Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengawasan dan pengembangan produk hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan produk hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana kerja UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
- c. Menyusun data informasi dan rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
- d. Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan produk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi;

- e. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan produk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- f. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan dan pengembangan produk hasil perikanan;
- g. Menyusun petunjuk teknis pengembangan produk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- h. Menyelenggarakan pelatihan pengolahan dan pengembangan produk hasil perikanan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan,sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman kebijakan pelaksanaan pengelolaan pelayanan pemotongan hewan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pemotongan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan pelayanan pemotongan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola pelaksanaan rencana kerja UPTD;
- c. Membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Menyusun bahan rencana target penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya;
- e. Melaksanakan pemeriksaan ternak sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan kesehatan daging (post mortem);
- f. Melaporkan kejadian penyakit hewan menular dalam waktu 1 x 24 jam;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak besar betina bertanduk/produktif;
- h. Melaksanakan pengafkiran terhadap daging/organ/jeroan yang tidak layak dikonsumsi masyarakat;
- i. Melaksanakan pengecepan terhadap daging yang sehat dan siap dipasarkan;
- j. Melaksanakan pengawasan transportasi daging yang meliputi alat dan tempat pengangkutan daging;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat/depo pedagang daging;
- l. Menjaga kebersihan peralatan, sarana dan prasarana di lingkungan RPH guna mempertahankan hygiene kesehatan daging;
- m. Mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- n. Menyusun perencanaan usulan kebutuhan anggaran operasional kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana uptd;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD pasar hewan dipimpin oleh seorang kepala uptd yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas, kepala uptd mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan rencana pengelolaan pasar hewan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pasar hewan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar hewan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola pelaksanaan rencana kerja UPTD;
- c. Membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Menyusun data informasi dan rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;

- e. Menyusun pedoman kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar hewan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan pengelolaan pasar hewan;
- g. Melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan hewan/ternak yang keluar masuk pasar hewan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan/ternak yang keluar masuk pasar hewan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keluar masuk hewan atau ternak;
- j. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan;
- k. Melaksanakan pengamatan terhadap kemungkinan adanya penyakit hewan menular;
- l. Melaporkan kejadian penyakit hewan menular dalam waktu 1 x 24 jam;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, terhadap persediaan, peredaran dan stabilitas harga hewan/ternak;
- n. Menyusun dan menyajikan data dan informasi pasar mengenai jumlah pedagang, jenis hewan dagangan, jumlah rata-rata transaksi penjualan, sarana dan prasarana pasar, dan sejenisnya;
- o. Mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi pasar yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- p. Melaksanakan koordinasi kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar hewan;

- q. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan rencana pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- c. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
- d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan, Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

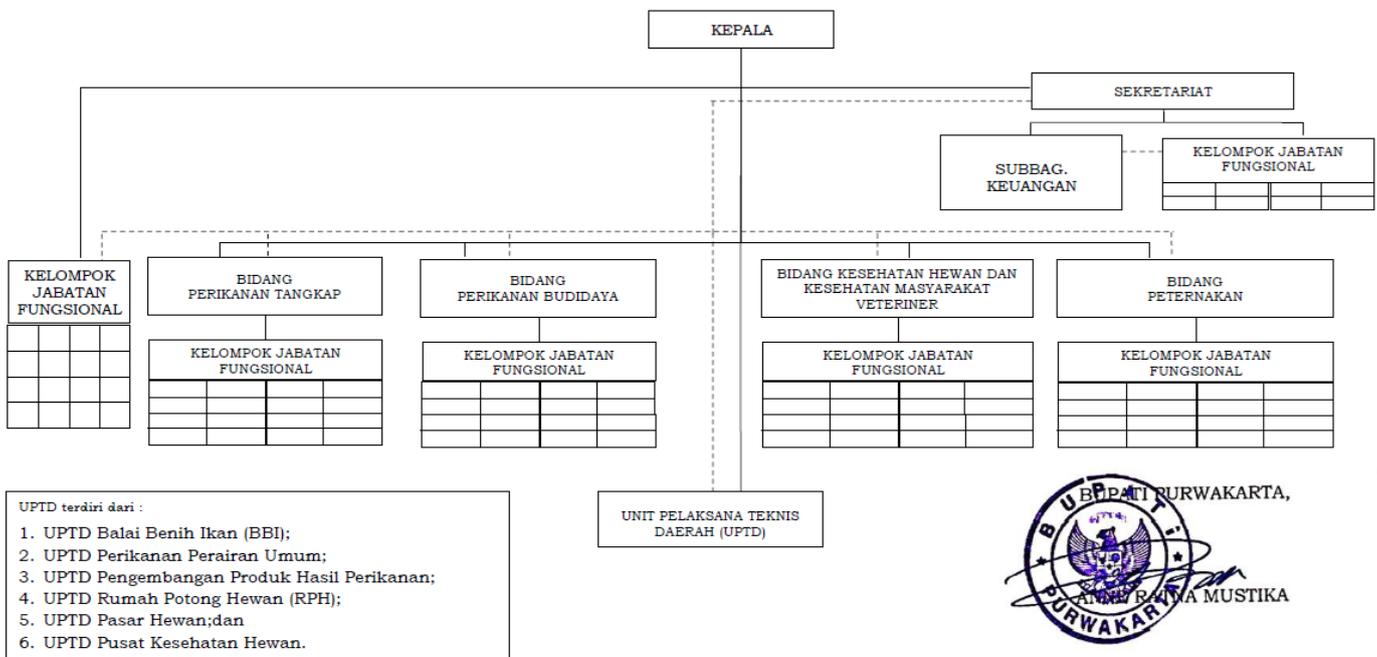
- a. Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang keswan kesmavet dalam pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- e. Membantu melaksanakan pengumpulan dan analisa data meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- f. Melaksanakan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
- g. Melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya;
- h. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- j. Membantu dalam langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
- k. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang;

- l. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 47 NOMOR 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 47 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

UPTD Kelas A Terdiri dari:

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.



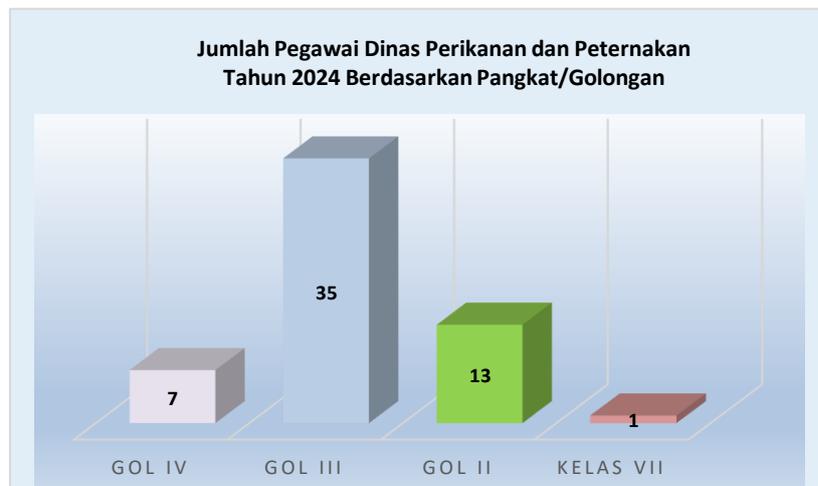
1.5. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2024 sebanyak 101 orang pegawai, terdiri dari 57 orang ASN dan 2 orang PTT, 23 Orang THL, 11 orang penjaga malam dan petugas kebersihan sebanyak 8 orang.

1.5.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

Adapun komposisi pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menurut golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan II sebanyak 13 orang dan kelas VII sebanyak 1 orang.

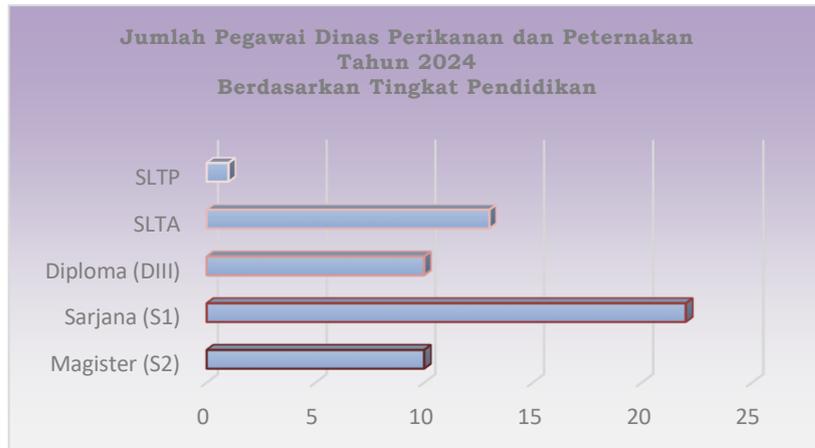
Grafik 1. Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Menurut Pangkat/ Golongan



1.5.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pendidikan

Dari seluruh pegawai, klasifikasi menurut tingkat pendidikan pegawai terdiri dari SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 22 orang, dan S2 sebanyak 10 orang.

Grafik 2. Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Menurut Tingkat Pendidikan



1.6. Isu Strategis

Isu strategis yang kini sedang dihadapi yaitu adanya pandemi Covid-19 menyebabkan relatif menurunnya angka indeks pendidikan, meningkatnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya upah pekerja serta terpuruknya sektor real khususnya pada sekunder dan tersier. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Asal Ternak dan Ikan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketersediaan pangan asal ternak dan ikan adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan asal ternak dan ikan, yang tercermin dari ketersediaan baik ternak ataupun ikan serta hasil asal

ternak maupun ikan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan. Mengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan asal ternak dan ikan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan asal ternak dan ikan yang cukup, Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) secara merata di seluruh daerah Kabupaten Purwakarta sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

2. Lingkungan Hidup

Produksi dan kapasitas produksi pangan asal ternak dan ikan semakin terbatas, karena:

- 1) Berlanjutnya konversi lahan peternakan dan perikanan ke penggunaan non peternakan dan perikanan ;
- 2) Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, hal ini menyebabkan lahan pangonan untuk ternak sera pakan alami ikan semakin berkurang ;
- 3) Semakin menurunnya kualitas air di Waduk Jatiluhur yang diakibatkan oleh beban limbah yang berasal dari internal dan eksternal waduk, yang menyebabkan berkurangnya produksi hasil budidaya ikan dan hasil tangkapan ikan;
- 4) Tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, maka isu-isu

strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyediaan produksi hasil ternak dan ikan
2. Peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan
3. Pengembangan sentra pembibitan ternak dan pembenihan ikan pedesaan
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan
5. Pelestarian komoditi ternak dan ikan potensi lokal
6. Peningkatan penerapan teknologi perikanan dan peternakan tepat guna
7. Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis perikanan dan peternakan
8. Pengembangan kawasan usaha perikanan dan peternakan yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan dan peternakan

1.7. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai 75,25 (Tujuh Puluh Lima Koma Dua Puluh Lima) predikat BB dengan nilai interpretasi Sangat Baik, nilai tahun 2023 ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 75,05. Kenaikan nilai di tahun 2023 tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang memuaskan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	75,25
	Predikat		BB-SANGAT Baik

1.8. Sistematika Penyajian

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan/kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Perangkat Daerah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dan disusun untuk periode tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dan disusun untuk periode tahun 2024. Renstra adalah pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan, memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan Renstra Perubahan disusun untuk lebih memfokuskan perencanaan kinerja sesuai dengan program prioritas nasional.

Rencana program, kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis dijabarkan untuk periode satu tahun dalam Rencana Kerja, kemudian Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam merumuskan Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Penetapan Kinerja inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap kepala Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan membuat Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan kesepakatan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan dan mencapai

kinerja pada tahun berjalan sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yang menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dengan indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 - 2026. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah :

“ Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima)

Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Visi dan Misi terfokus pada misi ke tiga yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal”** Dan Misi ke lima **“Mewujudkan Penyelenggaraan**

Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Renstra 2024-2026

Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
		2024	2025	2026
Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat				
Indikator kinerja 1 : Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
Indikator kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
Tujuan 2. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan				
Sasaran 1. Meningkatnya produksi perikanan				
Indikator kinerja : Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	5,25	5,25	5,25
Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan				
Indikator kinerja : Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	0,33	0,33	0,33
Tujuan 3. Meningkatkan produksi peternakan				
Sasaran 1. Meningkatnya produksi peternakan				
Indikator kinerja : Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	1,50	1,50
Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan				
Indikator kinerja : Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Kasus	0	0	0

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah. Strategi dan Arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Purwakarta. Strategi dan arah Pemerintah Daerah menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.

Berdasarkan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Peternakan terdapat dua sasaran yaitu meningkatkan produksi unggulan hasil pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Strategi dan pembangunan perikanan dan peternakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada berikut ini;

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Renstra 2024-2026

VISI : <i>PURWAKARTA CERDAS, SEHAT, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH</i>			
MISI 3 : <i>Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan	1.1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	1.1.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan UPR 1.1.1.2. Pengembangan kampung perikanan budidaya 1.1.1.3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

VISI : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		1.1.2. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan budidaya perikanan di perairan umum	1.1.2.1. Pengawasan budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA) 1.1.2.2. Pengawasan penangkapan ikan di perairan umum 1.1.2.3. Pengelolaan perikanan di perairan umum yang ramah lingkungan
	1.2. Meningkatnya Pelaku usaha perikanan	1.2.1. Peningkatan pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan	1.2.1.1. Pengembangan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			1.2.1.2. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 1.2.1.3. Penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Meningkatkan produksi peternakan	1.1. Meningkatnya produksi peternakan	1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan 1.1.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas ternak 1.1.3. Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengembangan usaha peternakan	2.1.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana peternakan 2.1.2.1. Penerapan teknologi peternakan melalui Inseminasi buatan (IB) dan Embrio Transfer (TE) 2.1.2.2. Penyediaan dan pengendalian mutu bibit ternak 2.1.2.3. Penyediaan, pengawasan mutu pakan dan obat hewan 1.1.3.1. Menciptakan iklim/situasi usaha peternakan yang kondusif 1.1.3.2. Membangun kerjasama dengan pelaku usaha peternakan melalui pembinaan/penyuluhan peternakan
	1.2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Masyarakat eteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	1.2.1. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis (PHMSZ) 1.2.2. Terjaminnya keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	2.2.1.1. Peningkatan pengamatan penyakit hewan 2.2.1.2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2.2.1.3. Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak 2.2.1.4. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner 2.2.2.1. Peningkatan keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan

VISI : <i>PURWAKARTA CERDAS, SEHAT, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH</i>			
MISI 5 : <i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	3.1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.1.1.1. Reformasi Birokrasi Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu. IKU digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja. Indikator kinerja pada pemerintahan merupakan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD Kabupaten Purwakarta dapat dicapai. Indikator Kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024-2026; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya.

Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut ;

Tabel 4. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Persentase peningkatan usaha perikanan	Persen	5,25
2	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33
3	Pertumbuhan produksi peternakan	Persen	1,50
4	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Persen	0
5	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam dokumen Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya beserta targetnya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) program dengan rincian Anggaran murni sebagai berikut:

Tabel 5. Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	B	12.095.758.914
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	
2.	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	1635,3 Ton	261.090.800
		Cakupan bina kelompok nelayan	18,97 %	
		Produksi perikanan kelompok nelayan	3,32 %	
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	76,85 %	
		Produksi Perikanan Tangkap	3,50 %	
3.	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	16.351,74 Ton	725.370.048
		Produksi Ikan Konsumsi	17.987 Ton	
		Produksi Benih Ikan UPR	1.078.038.512 Ekor	
		Produksi Benih Ikan BBI	8.100.000 ekor	
		Produksi Ikan Hias	608.990 ekor	
		Angka konsumsi ikan	36 Kg/Kapita	
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	100 %	
4.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi	1 Dokumen	26.652.000
		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	100 %	
5.	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Produk Perikanan	500 Ton	245.623.200
		Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	15 Kelompok	
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	140 Unit	
6.	PENYEDIAAN DAN	Pertumbuhan Produksi	1,5%	1.050.438.149

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
7.	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PENYULUH PERTANIAN	Peternakan		
		Cakupan Akseptor IB	75%	
		Persentase bibit ternak bersertifikat	10%	
		Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	2%	
		Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	16%	125.250.000
8.	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase RPH sesuai standar	100%	165.000.000
9.	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0 %	810.150.829
		Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	70 %	
		Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	0 Kasus	
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	17 Lokasi	
		Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	20.000 Ekor	
		Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	79 %	
		Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	828 Ton	
		Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	16,20 Ton	
		Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	38,80 Liter	
		JUMLAH		

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi 9 Program, 28 kegiatan dan 74 sub kegiatan sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.136.252.914	12.095.758.914
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		145.000.000	134.956.000
		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.956.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	20.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.767.034.875	9.099.434.875
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.743.161.875	9.075.561.875
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	11.998.600	11.998.600
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.874.400	11.874.400
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.296.000	15.296.000
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.091.000	7.091.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.205.000	8.205.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		117.890.000	50.050.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.050.000	50.050.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.840.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		503.556.263	326.824.263
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.950.000	22.950.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.732.000	0

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	120.730.000	120.730.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.514.263	62.514.263
		Penyediaan Bahan Material	18.182.000	18.182.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.448.000	62.448.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		285.928.296	285.928.296
		Pengadaan Mebel	142.404.000	142.404.000
		Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	143.524.296	143.524.296
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.547.835.480	1.629.495.480
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	309.154.504	309.154.504
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.234.680.976	1.316.340.976
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		753.712.000	553.774.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	105.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000	114.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	49.930.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	284.844.000	284.844.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	199.938.000	0
2.	PRORAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA		777.196.000	725.370.048
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		115.000.000	115.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	30.000.000	30.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaikan kecil	30.000.000	30.000.000
		Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan,	25.000.000	25.000.000

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
		bantuan pembiayaan, kemitraan usaha		
		Pemberian pmdampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	30.000.000	30.000.000
3.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan		662.196.000	610.370.048
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
		Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	292.250.023	251.222.023
		Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	294.258.977	283.461.025
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	30.000.000	30.000.000
		Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat	15.687.000	15.687.000
		Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	10.000.000	10.000.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		297.145.500	261.090.800
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota		217.121.000	202.103.800
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	19.776.000	14.726.800
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	99.963.000	93.325.000
		Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	97.382.000	94.052.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		80.024.500	58.987.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.164.000	29.164.000
		Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	25.361.000	25.361.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	25.499.500	4.462.000
5.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		26.652.000	26.652.000
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		26.652.000	26.652.000

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.326.000
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.326.000
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		245.623.200	245.623.200
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		10.000.000	10.000.000
		Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		80.000.200	80.000.200
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	80.000.200	80.000.200
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		155.623.000	155.623.000
		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	155.623.000	155.623.000
VI.	PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANAPERTANIAN		1.113.688.149	1.050.438.149
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		91.590.000	28.340.000
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	91.590.000	28.340.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma lewenangan Kabupaten / Kota		191.352.149	191.352.149
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	191.352.149	191.352.149
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		22.950.000	22.950.000
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.950.000	22.950.000
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengec		40.500.000	40.500.000

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	40.500.000	40.500.000
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		56.256.000	56.256.000
		Penjaminan Peredaran Benih /Bibit Ternak	22.950.000	22.950.000
		Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	33.306.000	33.306.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		711.040.000	711.040.000
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	427.540.000	427.540.000
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	283.500.000	283.500.000
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		165.000.000	165.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	165.000.000	165.000.000
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		859.731.500	810.150.829
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota		282.098.500	282.098.500
		Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan manular	73.200.000	73.200.000
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	80.000.000	80.000.000
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.898.500	128.898.500
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewandan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		114.452.000	81.371.329
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	37.473.000	37.473.000
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	50.000.000	43.898.329

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan(Rp.)
		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	26.979.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		250.575.000	250.575.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000	10.000.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	240.575.000	240.575.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		189.656.000	173.156.000
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	125.000.000	125.000.000
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner	16.500.000	0
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	10.687.000	10.687.000
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	37.469.000	37.469.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		22.950.000	22.950.000
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	22.950.000	22.950.000
VIII	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN		150.000.000	125.250.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		150.000.000	125.000.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	150.000.000	125.250.000
	JUMLAH		16.771.289.283	15.565.500.940

Total anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 anggaran murni adalah sebesar Rp. 16.771.289.283,-, sedangkan untuk anggaran perubahan sebesar Rp. 15.565.500.940,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan misinya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian tersebut diperlukan pengukuran, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingann Antara Target Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka kegiatan dan sasaran dapat diukur dan dievaluasi. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

Capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta diukur yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Hasil analisis dan evaluasi tersebut merupakan bahan tindakan dan perencanaan di masa mendatang.

Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam dukungannya pada sector perikanan dan peternakan. Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024. Selain itu dilaksanakan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Perbandingan capaian Sasaran Kinerja dan Target Tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut.

Tabel 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		Capaian (%)	Ket
		Target	Realisasi		
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabe					
<i>Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Capaian SAKIP Perangkat Daerah (predikat)</i>	BB	BB	100	Tercapai
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (predikat)</i>	Baik	Baik	100	Tercapai
2. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan					
<i>Sasaran 1. Meningkatnya produksi perikanan</i>	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan (%)</i>	5,25	5,25	100	Tercapai
<i>Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	<i>Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (%)</i>	0,33	0,33	100	Tercapai
3. Meningkatkan produksi peternakan					
<i>Sasaran 1. Meningkatnya produksi peternakan</i>	<i>Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)</i>	1,50	1,50	100	Tercapai
<i>Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	<i>Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat (kasus)</i>	0	0	100	Tercapai

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan 2024-2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 sasaran dengan menggunakan 6 Indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 6 indikator sasaran yang diukur, sebanyak 6 indikator mencapai target.

Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dapat diukur berdasarkan target dan realisasi sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah melalui: level maturitas SPIP.
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 85,64 (BAIK).
3. Meningkatnya produksi ikan hasil tangkap pada tahun 2024, sebanyak 1.663,189 ton, dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 1.635,30 ton. Hasil tersebut sudah melampaui target dengan persentase capaian sebesar 98,32%. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta sebesar 106.003,20 ton, sedangkan untuk target pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya sebesar 16.351,74 ton, sehingga dapat dikatakan bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sudah mencapai target, dengan persentase capaian mencapai 648,27%.
4. Meningkatnya produksi benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dimana pada tahun 2024 mencapai 1.159.679.000 ekor. Sementara untuk target produksi benih ikan di UPR pada tahun 2024 sebesar 1.078.038.512 Ekor, sehingga pada tahun 2024 produksi benih ikan mencapai target 107,57%.
5. Produksi ikan hias pada tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta sebesar 534.180 ekor, sedang untuk capaian target produksi ikan hias tahun 2024 sebesar 608.990 ekor, sehingga pada tahun 2024

capaian tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pelaku usaha budidaya ikan hias masih terbatas dan cenderung masih bersifat individual atau perseorangan belum banyak berkelompok. Sehingga perlu ditingkatkan kegiatan pembinaan dan diarahkan untuk berkelompok, agar memudahkan dalam pembinaan.

6. Meningkatnya angka konsumsi ikan pada tahun 2024 sebesar 40,30 kg/kap, sedangkan target untuk konsumsi ikan pada 2024 sebesar 36,00 kg/kap/thn. Dapat disimpulkan untuk indikator konsumsi ikan pada tahun 2024 sudah tercapai, dengan tingkat capaian 111,94%.
7. Meningkatnya perkembangan pelaku usaha perikanan, dari target indeks 0,33% realisasi sebesar 0,33% atau persentase pencapaian target sebesar 100%. Hal ini di gambarkan dengan peningkatan jumlah kelompok usaha pengolahan ikan pada tahun 2024 sudah mencapai target, dari target 14 kelompok terealisasi tahun 2024 sebanyak 16 kelompok usaha pengolahan ikan. Sementara produksi olahan produk hasil perikanan pada tahun 2024 sebesar 450 ton sedangkan target kinerja sebesar 400 ton, dengan demikian indikator kinerja produksi olahan produk hasil perikanan pada tahun 2024 telah mencapai target. Pada tahun 2024 total kelompok nelayan di Kabupaten Purwakarta berjumlah 55 kelompok terdiri dari 26 kelompok aktif dan 29 kelompok tidak aktif, sehingga cakupan kelompok nelayan yang dibina pada tahun 2024 adalah sebanyak 26 kelompok dari total 55 kelompok.
8. Meningkatnya pertumbuhan produksi peternakan yang sehat dan berkualitas, dengan jumlah produksi daging dari target 1,50%

realisasi 1,50% atau persentase pencapaian target sebesar 100%. Peningkatan pertumbuhan peternakan ini digambarkan dengan produksi ternak khususnya daging sebesar 37.318.987 kg dan telur 5.60.8158 kg.

9. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan. Pada tahun 2024 jumlah kelompok peternakan di Kabupaten Purwakarta berjumlah 107 kelompok, dari target cakupan bina kelompok peternakan 16% tercapai sesuai target sebesar 16% atau persentase capaian target 100%. Angka ini didapat dari persentase perbandingan kelompok peternak yang di bina dengan jumlah kelompok peternakan di Kabupaten Purwakarta sehingga didapat 16%.
10. Tidak adanya Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) pada tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta, hal ini sesuai dengan target bahwa tahun 2024 tidak ada (Nol) kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)
11. Meningkatnya persentase ternak yang divaksin dari total populasi wajib suntik. Pada tahun 2024 dilaksanakan vaksinasi Anthrax sebanyak 7.103 ekor, vaksinasi AI sebanyak 68.270 ekor vaksinasi Rabies sebanyak 709 ekor dan vaksinasi PMK sebanyak 95.539 ekor, total hasil vaksinasi AI sebanyak 91.884 ekor. Sedangkan populasi wajib suntik pada tahun 2024 sebanyak 68.270 ekor sehingga di dapat persentase ternak yang divaksin dari total populasi wajib suntik sebesar 74,30%.
12. Meningkatnya pengawasan lalu lintas ternak, pada tahun 2024 untuk keluar masuk (lau lintas) ternak tercatat sebanyak 22.150

ekor sudah mencapai target kinerja tahun 2024 yaitu sebanyak 20.000 ekor. Pemasukan ternak terdiri dari ternak sapi sebanyak 8.350 ekor, kerbau sebanyak 13.800 ekor, domba sebanyak 98.549 ekor dan ternak kambing sebanyak 2.554 ekor.

13. Meningkatnya Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan yang telah dilaksanakan di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Pada pelaksanaan penanganan penyakit tahun 2024, baik pengobatan ataupun pelayanan Kesehatan mencapai 2.004 ekor.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Hasil perbandingan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja			
2023	2024	2023	2024		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Meningkatnya Penyediaan Pangan Dan Gizi Asal Ternak dan Ikan		Penyediaan/ Konsumsi :	-					
		Daging	-	kg/kap	11,26	38,38	-	-
		Telur	-	kg/kap	8,30	22,40	-	-
		Susu	-	kg/kap	1,90	0,02	-	-
		Ikan	-	kg/kap	31,14	40,25	-	-
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan tangkap dan Peternakan		Laju Produksi Perikanan Budidaya	-	Persen	7	-0,22	-	-
		Laju Produksi Perikanan Tangkap	-	Persen	3,5	5,35	-	-
		Laju Produksi Peternakan	-	Persen	2	-13,53	-	-
		Laju Populasi Ternak	-	Persen	2	-15,55	-	-
3. Berkembangnya Kelompok/Kelembagaan Perikanan dan Peternakan		Angka konsumsi ikan	-	(kg/kap)	28,76	40,25	-	-
		Produksi olahan produk hasil perikanan	-	Ton	105	300	-	-
		Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan	-	Kelompok	17	17	-	-
		Jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	Unit	120	120	-	-
		Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Pelaku Agribisnis	-	persen	100	100	-	-
		Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya	-	Kec	17	17	-	-
4. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis		Kejadian kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	--	Kasus	0	0	-	-

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja			
2023	2024	2023	2024		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
dan Zoonosis (PHMSZ) serta Kesmavet		Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik	-	Persen	70	72,40	-	-
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	-	Kecamatan	17	17	-	-
		Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani kesehatannya	-	Ekor	473	5.010	-	-
		Jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak (lalu lintas ternak)	-	Ekor	40.952	53.745	-	-
		Peningkatan penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	-	Kecamatan	17	17	-	-
		Produk hasil ternak yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	-	Jenis	3	3	-	-
	1. Meningkatnya produksi produksi perikanan	-	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	-	5,25	5,25
	2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan	-	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	-	-	0,33	0,33
	3. Meningkatnya produksi produksi peternakan	-	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	-	-	1,50	1,50
	4. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	-	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	-	-	0	0

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2024 serta Capaian Kinerja Strategis pada Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja									
2023	2024	2023	2024		2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Penyediaan Pangan Dan Gizi Asal Ternak dan Ikan		Penyediaan/ Konsumsi :	-											
		Daging	-	kg/kap/th	10,61	34,49	10,82	35,56	11,04	37,90	11,26	38,38	-	-
		Telur	-	kg/kap/th	7,17	24,16	7,52	23,82	7,90	22,49	8,30	22,40	-	-
		Susu	-	kg/kap/th	0,56	0,14	0,84	0,14	1,27	0,16	1,90	0,02	-	-
		Ikan	-	kg/kap/th	29,34	35,81	29,34	39,58	30,52	40,15	31,14	40,25	-	-
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan tangkap dan Peternakan		Laju Produksi Perikanan Budidaya	-	Persen	14	16,48	14	-2,27	7	0,63	7	-0,22	-	-
		Laju Produksi Perikanan Tangkap	-	Persen	7,5	7,5	7,5	7,77	3,5	8,30	3,5	5,35	-	-
		Laju Produksi Peternakan	-	Persen	2	0,24	2	3,13	2	3,01	2	-13,53	-	-
		Laju Populasi Ternak	-	Persen	2	9,84	2	-10,84	2	-0,03	2	-15,55	-	-
		Angka konsumsi ikan	-	(kg/kap/thn)	28,76	35,81	28,76	39,58	28,76	40,15	28,76	40,25	-	-
Berkembangnya Kelompok/Kelembagaan Perikanan dan Peternakan		Produksi olahan produk hasil perikanan	-	Ton	90	763,72	95	359,704	100	320	105	300	-	-
		Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan	-	Kelompok	14	14	15	15	16	16	17	17	-	-
		Jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	Unit	105	93	105	111	105	131	120	120	-	-
		Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Pelaku Agribisnis	-	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
		Wilayah pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya	-	Kec	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-
		Kejadian kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	--	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) serta Kesmavet		Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik	-	Persen	70	72,02	70	70,25	70	72,71	70	72,40	-	-
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	-	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja									
2023	2024	2023	2024		2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang ditangani kesehatannya	-	Ekor	408	2.073	429	4.181	473	5.114	473	5.010	-	-
		Jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak (lalu lintas ternak)	-	Ekor	36.817	60.917	38.195	57.983	40.952	102.068	40.952	53.745	-	-
		Peningkatan penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	-	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	17	-	-
		Produk hasil ternak yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	-	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	-	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat									BB	BB
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat										BAIK
	Meningkatnya produksi perikanan	-	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25	5,25
	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	-	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33
	Meningkatnya produksi peternakan	-	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
	Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	-	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

3.1.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk penerapan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 didasarkan dengan mempedomani pada visi misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 Tahap Keempat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Kode	Bidang Urusan	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target Kinerja			Pagu Anggaran (Rp.)			Komdidi Akhir (2024)		Perangkat daerah
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp	
	Dinas Perikanan dan Peternakan													
	Urusan : Kelautan dan Perikanan													
3.25.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												12.095.758.914	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	BB	BB				BB		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat			BAIK	BAIK	BAIK				BAIK		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								596.986.000	605.487.000	616.877.000		261.090.800	
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.371,25	1.474,09	1.635,30	1.692,54	1.751,77				1.663,19		
		Produksi perikanan	Persen	10,50	10,50	5,25	5,25	5,25				5,25		
		Konsumsi ikan	Persen	20,00	10,50	30	35	35				35		
		Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	11,76	16,98	18,97	19,67	20,31				20,21		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	0,17	9,16	3,32	3,40	3,48				4,00		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	68,56	74,25	76,85	79,54	82,33				66,52		
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	7,50	7,50	3,50	3,50	3,50				6,15		
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								2.925.452.000	2.891.669.000	2.923.591.000		725.370.048	
		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	ton	08.037,89	14.735,00	16.351,74	17.496,36	18.721,11				106.003,20		
		Produksi Ikan Konsumsi	ton	15.646,00	16.205,00	17.987,00	19.189,00	20.473,00				106.003,20		
		Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	54.013.000,00	1.067.364.864,00	1.078.038.512,00	1.088.818.897,00	1.100.000.000,00				1.159.679.000,00		
		Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	6.630.833,00	6.740.000,00	20.260,00	20.462,00	20.667,00				7.120.000,00		
		Produksi Ikan Hias	Ekor	239.090,00	194.918,00	608.990,00	627.259,00	646.076,00				534.180,00		
		Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita	39,58	0,00	36,00	37,00	38,00				40,30		

Kode	Bidang Urusan	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target Kinerja			Pagu Anggaran (Rp.)			Komdidi Akhir (2024)		Perangkat daerah
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp	
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	130	133	136				104,00		
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan								41.632.000	42.226.000	43.020.000		26.652.000	
		Jumlah pengawaan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		
		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
3.25.06	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan								399.851.000	405.543.000	413.173.000		245.623.200	
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	300,00	400,00	500,00	550,00				450,00		
		Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00				16,00		
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	112,00	121,00	130,00	140,00	150,00				157,00		
	Urusan : Pertanian													
3.27.02	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								519.701.000	519.701.000	537.014.000		1.050.438.149	
		Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50				1,50		
		Cakupan Akseptor IB	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00				75,00		
		Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	3,00	5,00	10,00	13,00	15,00				10,00		
		Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	2,00				2,00		
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian								62.448.00	63.337.000	64.528.000		165.000.000	
		Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian								137.102.000	144.058.000	159.838.000		125.250.000	

Kode	Bidang Urusan	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target Kinerja			Pagu Anggaran (Rp.)			Komdidi Akhir (2024)		Perangkat daerah
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp	
		Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	15,00	13,00	16,00	12,00	12,00				16,00		
3.27.04	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								552.488.000	564.289.000	576.396.000		810.150.829	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				74,30		
		Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00				17,00		
		Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	57.983,00	39.574,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.660,00		
		Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen			79,00	84,00	87,50				79,00		
		Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	633,00	696,00	828,00	908,00	992,00				985,00		
		Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	13,00	14,30	16,20	18,00	19,80				16,20		
		Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	32,00	35,20	38,80	41,00	42,70				151,00		

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Bandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			
			2024		Nasional	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	-	-
2. Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	5,25	5,25	-	-
3. Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33	0,33	-	-
4. Meningkatnya produksi peternakan	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	1,50	-	-
5. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0	0	-	-

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang di laksanakan oleh Dinas Perikanan dan peternakan dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 12. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan penurunan kinerja serta alternative solusi

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabe						

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
<i>Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat</i>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB	BB	100	Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	Melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder Nilai LHE AKIP terkait
	Indeks Kepuasan Masyarakat (predikat)	Baik	Baik	100	Adanya dukungan dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam mencapai sasaran yang ditargetkan	Melakukan perbaikan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan						
<i>Sasaran 2. Meningkatnya produksi perikanan</i>	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	5,25	5,25	100	Kemauan nelayan untuk maju sangat tinggi. Potensi perikanan tangkap masih cukup luas untuk dikembangkan	Meningkatkan pembinaan, bantuan sarana dan prasarana perikanan baik perikanan budidaya dan tangkap
					Permintaan terhadap komoditi perikanan cukup tinggi	Memfasilitasi akses pembudidaya ikan dan nelayan dalam pemasaran
					Populasi KJA sudah melampaui batas (overload) sehingga berakibat kepada penurunan kualitas air dan tingkat produksi ikan.	Meningkatkan Pembinaan dan sosialisasi Culture Base Fisheries (CBF) dan Citarum Harum
					Destruktif fishing (penangkapan ikan tidak ramah lingkungan), Blooming eceng gondok pada perairan darat waduk	Pembentukan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang bekerja sama dalam pengawasan perikanan tangkap di perairan darat waduk
<i>Sasaran 3. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (%)	0,33	0,33	100	Skala usaha pelaku pemasaran produksi hasil perikanan masih berskala kecil. Permintaan terhadap komoditi hasil perikanan cukup tinggi. Mulai berkembangnya pusat kuliner hasil olahan ikan	Pelatihan tentang disertifikasi olahan ikan. Bantuan peralatan/saran dan prasarana pengolahan ikan. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)
3. Meningkatkan produksi peternakan						
<i>Sasaran 4. Meningkatnya produksi peternakan</i>	Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	1,50	1,50	100	Produksi dan produktivitas ternak masih belum optimal	Meningkatkan genetic ternak dengan Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)
					Alih fungsi lahan pertanian/peternakan menjadi lahan non pertanian, meyebabkan semakin sempit lahan/ladang penggembalan ternak. Semakin sulit untuk mencari Hijauan Makanan Ternak	Meningkatkan pemeliharaan ternak dengan cara intensifikasi dan introduksi teknologi secara tepat guna.
					Beralihnya mata pencaharian peternak ke usaha yang lain seperti usaha niaga	Pemberina modal untuk usaha ternak berupa bantuan bibit ternak dan mesin peternakan
<i>Sasaran 5. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat (kasus)	0	0	100	Makin berkurangnya pemotongan ternak di Rumah Pemotongan Hewan, dikarenakan kecenderungan masyarakat memilih daging beku dibandingkan daging segar karena relatif lebih murah	Sosialisasi dan pembinaan mengenai konsumsi daging ternak segar
					Kabupaten Purwakarta yang merupakan daerah endemi penyakit Anthrax	Pelaksanaan program pencegahan (vaksinasi) untuk mencegah timbulnya penyakit Anthrax

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
					Tingginya pasokan ternak dari luar yang memungkinkan penyebaran penyakit hewan/ternak	Peningkatan pengawasan lalu lintas hewan/ternak, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan/ternak
					Kemunculan penyakit hewan yang sulit diprediksi	Pelaksanaan surveillance (pengamatan penyakit hewan) secara rutin
					Populasi ternak yang masih tersebar dengan akses yang sulit dijangkau oleh petugas	Dedikasi petugas yang tinggi dengan penjadwalan pelayanan

3.1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran.

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} = \geq 1$$

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1(satu), maka efisiensi tidak tercapai. Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel								
<i>Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Capaian SAKIP Perangkat Daerah (predikat)</i>	BB	BB	100	12.095.758.914	11.105.133.675	91,81	1,09 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 92%
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (predikat)</i>	Baik	Baik	100				
2. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan								
<i>Sasaran 1. Meningkatnya produksi perikanan</i>	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan (%)</i>	5,25	5,25	100	1.013.112.848	976.555.050	96,39	1,04 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 96%
<i>Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	<i>Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (%)</i>	0,33	0,33	100	245.623.200	233.822.350	95,20	1,05 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 95%

3. Meningkatkan produksi peternakan								
<i>Sasaran 1. Meningkatnya produksi peternakan</i>	<i>Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)</i>	1,50	1,50	100	1.505.688.149	1.483.117.600	98,50	1,02 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 99%
<i>Sasaran 2. Meningkatnya pelaku usaha perikanan</i>	<i>Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat (Kasus)</i>	0	0	100	810.150.829	789.889.100	97,50	1,03 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 98%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari sub komponen - sub komponen yang menunjang indikator - indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta pada 2024 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya mencapai 100%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator - indikator tersebut. Persentase peningkatan produksi perikanan pada Tahun 2024 adalah 5,25% dari target 5,25%, sehingga persentase capaian target indikator persentase peningkatan produksi perikanan adalah 100%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut sebanyak Rp 976.555.050,- telah terealisasikan dari pagu Rp 1.013.112.848,- atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 96,39% untuk mencapai target kinerja persentase peningkatan produksi perikanan. Dari hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran di dapat 1,04 ($1,04 \geq 1$), yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran efisien. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat

mencapai target kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan pada Tahun 2024 adalah 96,39%.

Dengan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di atas sebelumnya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator-indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana terlihat di Tabel 25. Hasil dari tabel tersebut didapat efisiensi keseluruhan sebesar 93,04%, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Perikanan dan Peternakan pada 2024 telah efisien.

Tabel 14. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Program

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel								
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (predikat)							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (predikat)							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100,00	12.095.758.914	11.105.133.675	91,81	1,09 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 92%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100,00				
Tujuan 2. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan								

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaran 2. Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	5,25	5,25	100,00	1.013.112.848	976.555.050	96,39	1,04 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 96%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.635,30	1.663,19	101,71	261.090.800	254.683.800	97,55	Tingkat Efisiensi 1,18
	Produksi perikanan (%)	5,25	5,25	100,00				
	Konsumsi ikan (persen)	30	35	116,67				
	Cakupan bina kelompok nelayan (persen)	18,97	20,21	106,54				
	Produksi perikanan kelompok nelayan (persen)	3,32	4,00	120,48				
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	76,85	66,52	86,56				
	Produksi Perikanan Tangkap (persen)	3,50	6,15	175,71				
	Rataan			115,38				
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)	16.351,74	106.003,20	648,27	725.370.048	695.529.250	2,58	Tingkat Efisiensi 2,58
	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	17.987,00	106.003,20	589,33				
	Produksi Benih Ikan UPR (ekor)	1.078.038.512	1.159.679.000	107,57				
	Produksi Benih Ikan BBI (ekor)	6.740.000	7.120.000	105,64				
	Produksi Ikan Hias (ekor)	608.990	534.180	87,72				
	Angka konsumsi ikan (kg/kap)	36,00	40,30	111,94				
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina (%)	130,00	104,00	80,00				
	Rataan			247,21				
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	26.652.000	26.342.000	98,84	Tingkat Efisiensi 1,01
	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan (%)	100,00	100,00	100,00				
	Rataan			100,00				
Sasaran 3. Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (%)	0,33	0,33	100,00	245.623.200	233.822.350	95,20	1,05 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 95%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	400,00	450,00	112,50	245.623.200	233.822.350	95,20	Tingkat Efisiensi 1,22

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (kelompok)	14,00	16,00	114,29				
	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	130,00	157,00	120,77				
	Rataan			115,85				
Tujuan 3. Meningkatkan produksi peternakan								
Sasaran 4. Meningkatkan produksi peternakan	Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	1,50	1,50	100,00	1.505.688.149	1.483.117.600	98,50	1,02 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 99%
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	1,50	1,50	100,00	1.050.438.149	1.038.348.100	98,85	Tingkat Efisiensi 1,01
	Cakupan Akseptor IB (%)	75,00	75,00	100,00				
	Persentase bibit ternak bersertifikat (%)	10,00	10,00	100,00				
	Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (%)	2,00	2,00	100,00				
	Rataan			100,00				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase RPH sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	165.000.000	162.540.000	98,51	Tingkat Efisiensi 1,02
	Rataan			100,00				
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (peternakan) (%)	16,00	16,00	100,00	125.250.000	119.689.500	95,56	Tingkat Efisiensi 1,05
	Rataan			100,00				
Sasaran 5. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat (Kasus)	0	0	100	810.150.829	789.889.100	97,50	1,03 (≥ 1 = Efisien) Tingkat efisiensi 98%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0,00	0,00	100,00	810.150.829	789.889.100	97,50	Tingkat Efisiensi 1,39
	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik (%)	70,00	74,30	106,14				
	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (kasus)	0,00	0,00	100,00				
	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan (lokasi)	17,00	17,00	100,00				
	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) (ekor)	20.000,00	20.660,00	103,30				
	Peningkatan Penjaminan	79,00	79,00	100,00				

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	<i>Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) (%)</i>							
	<i>Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (ton)</i>	828,00	985,00	118,96				
	<i>Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (ton)</i>	16,20	16,20	100,00				
	<i>Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (liter)</i>	38,80	151,00	389,18				
	Rataan			135,29				

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut.

Tabel 15. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB			100	MENUNJANG
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK			100	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	100	MENUNJANG
					Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	MENUNJANG
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100	MENUNJANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian	100	MENUNJANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran (Laporan)		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	100	MENUNJANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	100	MENUNJANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	100	MENUNJANG
				Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	MENUNJANG
2.	Meningkatnya produksi perikanan	3. Persentase peningkatan produksi perikanan (persen)	100				MENUNJANG
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap (ton)	101,71	MENUNJANG
					Produksi perikanan (persen)	100,00	
					Konsumsi ikan (persen)	116,67	
					Cakupan bina kelompok nelayan (persen)	106,54	
					Produksi perikanan kelompok nelayan (persen)	120,48	
					Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	86,56	
					Produksi Perikanan Tangkap (persen)	175,71	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pengelolaan ikan yang dapat diusahakan (Laporan)	100	MENUNJANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan nelayan kecil yang dilaksanakan (Laporan)	100	MENUNJANG
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)	648,27	MENUNJANG
					Produksi Ikan Konsumsi (ton)	589,33	
					Produksi Benih Ikan UPR (ekor)	107,57	
					Produksi Benih Ikan BBI (ekor)	105,64	
					Produksi Ikan Hias (ekor)	87,72	
					Angka konsumsi ikan (kg/kap)	111,94	
					Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina (Persen)	80,00	
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengelolaan pembudidaya ikan (Laporan)	100	MENUNJANG
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi (Dokumen)	100	MENUNJANG
					Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan (Persen)	100	
				Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air Lainnya yang dapat diusahakan (Laporan)	100	MENUNJANG
3	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	4. Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (persen)	100				MENUNJANG
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan produk perikanan (ton)	112,50	MENUNJANG
					Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan (klmpk)	114,29	
					Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (unit)	120,77	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)	100	MENUNJANG	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran (Laporan)	100	MENUNJANG	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran (Laporan)	100	MENUNJANG	
4	Meningkatnya produksi peternakan	5. Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	100				MENUNJANG	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	100,	MENUNJANG	
					Cakupan Akseptor IB (%)	100		
					Persentase bibit ternak bersertifikat (persen)	100		
					Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (persen)	100		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian (Laporan)	100	MENUNJANG
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Laporan)	100	MENUNJANG
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan (Laporan)	100	MENUNJANG
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (Laporan)	100	MENUNJANG	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Laporan)	100	MENUNJANG
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase RPH sesuai standar (persen)	100	MENUNJANG
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian (unit)	100	MENUNJANG
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	100	MENUNJANG
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Laporan)	100	MENUNJANG
5.	Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	6. Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (kasus)	100				MENUNJANG
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	100	MENUNJANG
					Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik (%)	106,14	
					Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (kasus)	100	
					Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan (lokasi)	100	
					Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) (ekor)	103,30	
					Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) (%)	100	
					Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (ton)	118,96	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator or Sasaran (%)	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (ton)	100,00	
					Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) (liter)	389,18	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis serta wilayah pembebasan penyakit hewan menular (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (Laporan)	100	MENUNJANG
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	100	MENUNJANG
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Laporan)	100	MENUNJANG
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan (Laporan)	100	MENUNJANG

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, alokasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebesar terdiri dari Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.104.992.040,-, dengan realisasi sebesar Rp. 8.531.807.435,-. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 6.024.980.165, dengan realisasi Rp. 5.494.599.440,-. Sedangkan Belanja Modal diperuntukan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin

sebesar Rp. 400.341.900,-. Anggaran belanja langsung tersebut untuk membiayai 9 program pembangunan dan 30 kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 92,71% yaitu dari anggaran sebesar Rp. 15.565.500.940,-, terealisasi sebesar Rp. 14.431.476.425,-. Rincian realisasi belanja dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.095.758.914	11.105.133.675	91,81
	Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah		134.956.000	102.558.400	75,99
		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	34.956.000	31.184.000	89,21
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	12.936.000	86,24
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	13.450.000	89,67
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	6.842.000	68,42
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	4.916.500	49,17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	14.854.000	74,27
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	18.375.900	61,25
	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah		9.099.434.875	8.551.815.435	93,98
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.075.561.875	8.528.257.435	93,97
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	11.998.600	11.825.600	98,56
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	11.874.400	11.732.400,00	98,80

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.296.000	13.806.000	90,26
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.091.000	5.601.000	78,99
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.205.000	8.205.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.050.000	0	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.050.000	0	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		326.824.263	276.761.278	84,68
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.950.000	22.950.000	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	100,00
		Penyediaan bahan logistik kantor	120.730.000	87.570.000	72,53
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.514.263	61.035.000	97,63
		Penyediaan Bahan Material	18.182.000	8.960.000	49,28
		Fasiltasi Kunjungan Tamu	20.000.000	14.020.000	70,10
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.448.000	62.226.278	99,64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		285.928.296	281.907.900	98,59
		Pengadaan Mebel	142.404.000	138.628.000	97,35
		Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	143.524.296	143.279.900	99,83
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.629.495.480	1.386.644.638	85,10
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	309.154.504	186.190.137	60,23
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.340.976	1.196.454.501	90,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		553.774.000	491.640.024	88,78
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	71.601.800	68,19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000	88.688.900	77,80
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	47.430.000	94,99
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	284.844.000	283.919.324	99,68
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
II	PRORAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA		725.370.048	695.529.250	95,89
	Pemberdayaan Pembudidaya IkanKecil		115.000.000	109.468.250	95,19
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	30.000.000	29.180.000	97,27
		Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaikan kecil	30.000.000	29.900.000	99,67
		Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	25.000.000	22.490.000	89,96
		Pemberian pmdampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	30.000.000	27.898.250	92,99
	Pengelolaan Pembudidaya Ikan		610.370.048	586.051.000	96,02
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikandalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	18.625.000	93,13
		Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	251.222.023	248.684.500	98,99
		Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikandalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	283.461.025	267.144.500	94,24
		Pengelolaan KesehatanIkan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	30.000.000	27.629.000	92,10
		Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat	15.687.000	14.968.000	95,42
		Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	10.000.000	9.000.000	90,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANTANGKAP		261.090.800	254.683.800	97,55
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah KabupatenKota		202.103.800	199.722.500	98,82
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	14.726.800	14.363.000	97,53
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	93.325.000	91.949.000	98,53
		Penjaminan ketersediaansarana usaha perikanan tangkap	94.052.000	93.410.500	97,53
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		58.987.000	54.961.300	93,18
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.164.000	26.851.000	92,07
		Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	25.361.000	24.016.500	94,70
		Pelaksanaan FasilitasiBantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	4.462.000	4.093.800	91,75

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
IV.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		26.652.000	26.342.000	98,84
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawad dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		26.652.000	26.342.000	98,84
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.286.000	99,70
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.056.000	97,97
V.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		245.623.200	233.822.350	95,20
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		10.000.000	9.680.400	96,80
		Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	9.680.400	96,80
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		80.000.200	70.081.550	87,60
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	80.000.200	70.081.550	87,60
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		155.623.000	154.060.400	99,00
		Peningkatan ketersediaan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	155.623.000	154.060.400	99,00
VI.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANA PERTANIAN		1.050.438.149	1.038.348.100	98,85
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		28.340.000	28.040.100	98,94
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28.340.000	28.040.100	98,94
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Iewenangan Kabupaten / Kota		191.352.149	187.747.000	98,12

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	191.352.149	187.747.000	98,12
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		22.950.000	22.268.000	97,03
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.950.000	22.268.000	97,03
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		40.500.000	40.230.000	99,33
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	40.500.000	40.230.000	99,33
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		56.256.000	55.056.000	97,87
		Penjaminan Peredaran Benih /Bibit Ternak	22.950.000	22.350.000	97,39
		Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	33.306.000	32.706.000	98,20
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		711.040.000	705.007.000	99,15
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	427.540.000	425.677.000	99,56
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	283.500.000	279.330.000	98,53
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		165.000.000	162.540.000	98,51
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	165.000.000	162.540.000	98,51
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		810.150.829	789.889.100	97,50
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota		282.098.500	279.571.300	99,10
		Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan manular	73.200.000	73.200.000	100,00
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	80.000.000	78.806.400	98,51
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.898.500	127.564.900	98,97
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		81.371.329	73.288.450	90,07

No	Nama Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	37.473.000	31.480.450	84,01
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	43.898.329	41.808.000	95,24
		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		0	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		250.575.000	249.051.000	99,39
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000	10.000.000	100,00
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	240.575.000	239.051.000	99,37
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		173.156.000	167.650.350	96,82
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	125.000.000	120.571.800	96,46
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner	0	0	0
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	10.687.000	9.617.000	89,99
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	37.469.000	37.461.550	99,98
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		22.950.000	20.328.000	88,58
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	22.950.000	20.328.000	88,58
VIII	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN		125.250.000	119.689.500	95,56
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa	125.250.000	119.689.500	95,56

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian serapan anggaran program dan kegiatan Tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memuat beberapa kegiatan yang terdiri dari aspek Perencanaan dan Penganggaran, Administrasi Keuangan,

Administrasi Kepegawaian, Administrasi umum, Penyediaan Jasa, Sarana dan Prasarana serta kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang nilai capaian serapan anggarannya sebesar 91,81%.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memuat dua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum, pemberian sarana dan prasarana untuk nelayan serta pemberdayaan kepada nelayan kecil di Kabupaten Purwakarta. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 97,55%.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memuat dua kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan, dimana salah satunya adalah penyediaan bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya ikan dan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 95,89%.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan yang memuat satu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan pembudidayaan. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 98,84%.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memuat tiga kegiatan yang melaksanakan pembinaan bagi usaha/pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan serta penyediaan bahan baku pengolahan ikan. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 95,20%.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian memuat enam kegiatan, yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sarana prasarana peternakan, seperti Inseminasi Buatan, bantuan Hijauan Makanan Ternak dan penagwasan terhadap penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak atau Hijauan Pakan ternak. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 98,85%.

7. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari satu kegiatan yang mengurus sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH). Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 98,51%.

8. Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian memuat satu kegiatan yang melaksanakan penyuluhan kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 95,56%.

9. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat memuat lima kegiatan, program ini melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner. Capaian serapan anggaran ini program ini mencapai 97,50%

3.3. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta diperoleh dari Retribusi Pelayanan Pasar (Retribusi Pelataran) dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan). Adapun target dan capaian Pendapatan daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 17. Target dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

No.	Uraian	Target Tahun 2024	Realiasi Tahun 2024	Persentase (%)
1.	Retribusi Pelayanan Pasar			
	Retribusi Pelataran	125.024.550,-	96.300.000,-	77,02
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan			
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	197.240.400,-	49.650.000,-	25,17
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil perikanan Daerah, brupa Bibit atau Benih Ikan	42.299.618,-	35.450.000,-	83,81
	Jumlah	364.564.568,-	181.400.000,-	49,76

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian PAD Dinas Perikanan dan Peternakan tidak mencapai target (49,76%. Beberapa masalah penyebab pencapaian tidak sesuai dengan target sebagai berikut;

1. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (UPTD Rumah Potong Hewan)

Banyak daging beku yang masuk ke Kab, Purwakarta dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga daging segar (harga daging beku Rp. 110.000, harga daging segar Rp.130.000 – Rp. 140.000), menyebabkan konsumen yang beralih dari daging segar ke daging beku.

2. Retribusi Pelayanan Pasar (UPTD Pasar Hewan)

Pada UPTD Pasar Hewan, keberadaan kandang penampungan di luar area pasar memungkinkan transaksi jual beli terjadi di luar hari pasar, sehingga retribusi menjadi sulit dipungut. Selain itu, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan penutupan beberapa pasar hewan di Jawa Tengah dan Jawa Timur berdampak pada kesulitan bandar dalam memperoleh ternak, yang pada akhirnya mempengaruhi perputaran perdagangan hewan di Purwakarta. Sapi yang masuk ke Pasar Hewan Ciwareng mayoritas berasal dari Lampung, Purwakarta, Subang, dan Karawang, dengan jumlah maksimal sekitar 150 ekor per hari pasar. Namun, sebagian besar pedagang hanya membayar retribusi untuk ternak yang berhasil terjual, bukan untuk keseluruhan ternak yang mereka bawa. Berbagai upaya telah dilakukan. UPTD Pasar Hewan telah menggelar tiga kali rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Desa, Kecamatan, Perum Perhutani, KCD Kehutanan Wilayah IV Purwakarta, Polsek Kota, dan Koramil Bungursari. Saat ini, hasil rapat masih menunggu surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemilik lahan kandang penampungan ternak. Selain itu, direncanakan pemindahan

pintu masuk pasar sehingga semua truk pengangkut sapi wajib melewati jalur retribusi guna memastikan setiap ternak yang masuk dikenakan pungutan sesuai ketentuan.

3. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Perikanan UPTD Balai benih Ikan (BBI)

UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Cibogogirang menghadapi tantangan dalam proses pemijahan akibat kondisi lingkungan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Musim kemarau panjang serta perubahan suhu dan kualitas air yang signifikan berdampak pada kondisi induk ikan, sehingga menghambat produktivitas benih. Untuk mengatasi kendala di UPTD BBI, telah diterapkan manajemen pakan yang memastikan ikan mendapatkan asupan pakan yang cukup secara teratur, sehingga pertumbuhan dan produktivitas tetap terjaga. Selain itu, pemantauan terhadap kondisi air dilakukan secara berkala guna menjaga kestabilan lingkungan perairan dan meminimalkan dampak dari perubahan cuaca ekstrem.

3.4. Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Sasaran Dinas Perikanan Dan Peternakan Tahun 2024

Adapun target dan realisasi anggaran terkait pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Target Dan Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Sasaran Dinas Perikanan Dan Peternakan Tahun 2024

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
I.	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN		1.013.112.848	976.555.050	96,39
		PROGRAM PENGELOLAAN	261.090.800	254.683.800	97,55

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		PERIKANANTANGKAP			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	202.103.800	199.722.500	91,99
		1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	14.726.800	14.363.000	97,53
		2. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	93.325.000	91.949.000	98,53
		3. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	94.052.000	93.410.500	99,32
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.987.000	54.961.300	93,18
		1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.164.000	26.851.000	92,07
		2. Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	25.361.000	24.016.500	94,70
		3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	4.462.000	4.093.800	91,75
		PRORAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	725.370.048	695.529.250	95,89
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	115.000.000	109.468.250	95,19
		1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	30.000.000	29.180.000	97,27
		2. Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	30.000.000	29.900.000	99,67
		3. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	25.000.000	22.490.000	89,96
		4. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	30.000.000	27.898.250	92,99
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	610.370.048	586.061.000	96,02
		1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	18.625.000	93,13
		2. Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	251.222.023	248.684.500	98,99
		3. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	283.461.025	267.144.500	94,24
		4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	30.000.000	27.639.000	92,13
		5. Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat	15.687.000	14.968.000	95,42
		6. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	10.000.000	9.000.000	90,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.652.000	26.342.000	98,84
		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawan dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	26.652.000	26.342.000	98,84

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.286.000	99,70
		2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	13.326.000	13.056.000	97,97
II	MENINGKATNYA USAHA PERIKANAN		245.623.200	233.822.350	95,20
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	245.623.200	233.822.350	95,20
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000	9.680.400	96,80
		1. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	9.680.400	96,80
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	80.000.200	70.081.550	87,60
		1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	80.000.200	70.081.550	87,60
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.623.000	154.060.400	99,00
		1. Peningkatan ketersediaan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	155.623.000	154.060.400	99,00
III	MENINGKATNYA PRODUKSI PETERNAKAN		1.505.688.149	1.483.117.600	98,50
		PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANA PERTANIAN	1.050.438.149	1.038.348.100	98,85
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	28.340.000	28.040.100	98,94
		1. Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28.340.000	28.040.100	98,94
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten / Kota	191.352.149	187.747.000	98,12
		2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	191.352.149	187.747.000	98,12
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.950.000	22.268.000	97,03
		1. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.950.000	22.268.000	97,03
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	40.500.000	40.230.000	99,33
		1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	40.500.000	40.230.000	99,33

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	56.256.000	55.056.000	97,87
		1. Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	22.950.000	22.350.000	97,39
		2. Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	33.306.000	32.706.000	98,20
		Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	711.040.000	705.007.000	99,15
		1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	427.540.000	425.677.000	99,56
		2. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	283.500.000	279.330.000	98,53
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	165.000.000	162.540.000	98,51
		Pembangunan Prasarana Pertanian	165.000.000	162.540.000	98,51
		1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	165.000.000	162.540.000	98,51
		PENYULUHAN PERTANIAN	125.250.000	119.689.500	95,56
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	125.250.000	119.689.500	95,56
		1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	125.250.000	119.689.500	95,56
IV	TERCIPTANYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER YANG KONDUSIF BAGI KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT		810.150.829	789.889.100	97,50
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	810.150.829	789.889.100	97,50
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.098.500	279.571.300	99,10
		1. Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	73.200.000	73.200.000	100,00
		2. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	80.000.000	78.806.400	98,51
		3. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.898.500	127.564.900	98,97
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	81.371.329	73.288.450	90,07
		1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	37.473.000	31.480.450	84,01

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	43.898.329	41.808.000	95,24
		3. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		0	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.575.000	249.051.000	99,39
		1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000	10.000.000	100,00
		2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	240.575.000	239.051.000	99,37
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	173.156.000	167.650.350	96,82
		1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	125.000.000	120.571.800	96,46
		2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	
		3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	10.687.000	9.617.000	89,99
		4. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	37.469.000	37.461.550	99,98
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	22.950.000	20.328.000	88,58
		1. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	22.950.000	20.328.000	88,58
V	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT		12.095.758.914	11.105.133.675	91,81
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.095.758.914	11.105.133.675	91,81
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.956.000	102.558.400	75,99
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.956.000	31.184.000	89,21
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	12.936.000	86,24
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	13.450.000	89,67
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	6.842.000	68,42
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	4.916.500	49,17
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	14.854.000	74,27
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	18.375.900	61,25
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.099.434.875	8.551.815.435	93,98
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.075.561.875	8.528.257.435	93,97
		2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.998.600	11.825.600	98,56
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.874.400	11.732.400,00	98,80
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.296.000	13.806.000	90,26

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.091.000	5.601.000	78,99
		2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.205.000	8.205.000	100,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.050.000	0	0,00
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.050.000	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.824.263	276.761.278	84,68
		1. Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.950.000	22.950.000	100,00
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	100,00
		4. Penyediaan bahan logistic kantor	120.730.000	87.570.000	72,53
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.514.263	61.035.000	97,63
		6. Penyediaan Bahan Material	18.182.000	8.960.000	49,28
		7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	14.020.000	70,10
		8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.448.000	62.226.278	99,64
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.928.296	281.907.900	98,59
		1. Pengadaan Mebel	142.404.000	138.628.000	97,35
		2. Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	143.524.296	143.279.900	99,83
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.629.495.480	1.386.644.638	85,10
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	309.154.504	186.190.137	60,23
		3. Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor	1.316.340.976	1.196.454.501	90,89
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.774.000	491.640.024	88,78
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	71.601.800	68,19
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000	88.688.900	77,80
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000	47.430.000	94,99
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	284.844.000	283.919.324	99,68
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2024 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran ke-1: *Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat*

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator dalam menilai kualitas pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung penilaian dari hasil pengukuran berupa kuisioner yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun terhadap pelayanan unit kerja Dinas Perikanan dan peternaka. Nilai rata-rata pelayanan publik berupa hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan pada akhir tahun 2024 sebesar 85,64.

2) Sasaran ke-2: *Meningkatnya Produksi Perikanan*

Hasil Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meliputi ikan Betok, ikan Nila, ikan Gabus, ikan Nilem, ikan Sepat rawa, Ikan Mas, Ikan Tawes, ikan Lalawak, ikan Baung, ikan Patin, Lobster. Produksi Perikanan Budidaya meliputi udang galah, ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Lele dan ikan lainnya. Adapun realisasi produksinya sebagai berikut :

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang perolehannya tidak dalam

keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun di perairan umum namun penangkapannya tersebut dibatasi oleh peraturan. Target produksi komoditas ikan tangkap tahun 2024 sebanyak 1.635,30 ton dengan realisasi produksi mencapai 1.663,189 ton atau persentase pencapaian sebesar 98,32%. Produksi ikan hasil tangkapan tahun 2024 juga naik dari tahun 2023 yaitu sebesar 1.566,860 ton atau 6,15%. Secara kumulatif dapat dilihat perbandingan realisasi produksi ikan tahun 2023 dan tahun 2024 seperti pada Tabel berikut dibawah ini.

Tabel 19. Produksi Ikan Hasil Tangkapan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun 2023

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)		
		2023	2024	%
1.	Bawal	13,04	16,697	28,04
2.	Belida	16,61	19,569	6,15
3.	Betok	1,27	1,592	25,35
4.	Betutu	0,33	0,897	171,82
5.	Beunteur	2,44	2,947	20,78
6.	Gabus	61,61	48,57	-21,17
7.	Geng gehek	1,06	0,761	-28,21
8.	Hampal	2,45	3,252	32,73
9.	Lalawak	8,47	2,52	-70,25
10.	Lele	5,89	2,351	-60,08
11.	Lobster air tawar	2,77	1,393	-49,71
12.	Lubang/ Moa	0,03	-	-
13.	Mas	14,70	16,143	9,82
14.	Mujaer	2,45	2,309	-5,76
15.	Nila	897,96	920,035	2,46
16.	Nilem	0,48	0,432	-10,00
17.	Paray	4,62	16,203	250,71
18.	Patin	505,81	575,401	13,76
19.	Sepat Siam	0,52	5,64	984,62
20.	Sepat Rawa	3,80	-	-
21.	Tagih/Baung	11,08	18,221	64,45

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (ton)		
		2023	2024	%
22.	Tawes	1,58	1,155	-26,90
23.	Udang Tawar	7,86	7,1	-9,67
	JUMLAH	1.566,86	1.663,188	6,15

Produksi Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2024 produksi ikan budidaya di Kabupaten Purwakarta sebesar 106.003,20 ton, turun sebesar 2.472,17 ton dari tahun 2023 yaitu 108.475,37 ton. Sedangkan untuk target pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya sebesar 16.351,74 ton, sehingga dapat dikatakan bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sudah mencapai target.

Kita ketahui bahwa produksi ikan di Kabupaten Purwakarta di hasilkan dari perikanan budidaya (Kolam Air Tenang Kolam Air Deras) dan Kolam Jaring Apung (KJA). Produksi ikan kolam budidaya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,47% dari tahun 2023, terutama jenis ikan patin, bawal, mas dan lele. Produksi ikan kolam budidaya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Produksi Ikan Kolam Budidaya (kolam air tenang dan kolam air deras) Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan Kolam Budidaya (ton)		
		2023	2024	%
1	2	4	5	6
1.	Mas	323,58	320,70	0,99
2.	Nila	744,01	751,47	1,01
3.	Tawes	0,00	0,00	0
4.	Gurame	89,13	88,93	1
5.	Tambakan	0,00	0,00	0
6.	Sepat siam	53,73	53,24	0,99
7.	Lele	853,49	864,48	1,01

8.	Patin	154,76	152,06	0,98
9.	Bawal	101,67	100,32	0,99
10.	Ikan Lainnya	0	0,00	0
	JUMLAH	2.320,37	2.331,20	0,47

Hampir 97% lebih produksi perikanan di Kabupaten Purwakarta di hasilkan dari Kolam Jaring Apung (KJA). Produksi Ikan yang berasal dari Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Produksi Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Produksi Ikan KJA (ton)		
		2023	2024	%
1.	Mas	44.252	43.368	0,98
2.	Nila	32.625	32.836	1,01
8.	Patin	18.105	16.552	0,91
9.	Bawal	11.173	10.916	0,98
	JUMLAH	106.155	103.672	-2,34

Pada Tabel 3. terlihat bahwa produksi ikan yang berasal dari Keramba Jaring Apung pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 106.553 ton pada tahun 2023, menjadi 103.672 ton pada tahun 2024 atau turun sebesar 2,34%. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2017 di Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur dilaksanakan penataan lokasi dan pengendalian keramba jaring apung serta penanggulangan pencemaran air baku guna mewujudkan keseimbangan ekosistem, sehingga dilakukan tindakan penertiban terhadap keramba jaring apung yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Operasi Danau Jatiluhur Bersih.

Produksi Benih Ikan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) adalah kelompok perorangan yang memproduksi benih ikan air tawar. Produksi benih ikan pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Purwakarta tahun 2024, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Produksi Benih Ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan 2024.

No	Jenis Benih Ikan	Jumlah		Persentase kenaikan (%)
		2023	2024	
1	Ikan Mas	277.069.000	282.469.000	1,95
2	Nila	648.271.000	677.911.000	4,57
3	Gurame	11.072.000	11.557.000	4,38
4	Tawes	4.744.000	4.756.000	0,25
5	Lele	160.553.000	166.491.000	3,70
6	Sepat Siam	4.724.000	5.009.000	6,03
7	Bawal Tawar	5.948.000	5.950.000	0,03
8	Patin	5.530.000	5.536.000	0,11
Jumlah		1.117.911.000	1.159.679.000	3,74

Dari tabel tersebut terdapat kenaikan untuk produksi benih ikan di UPR sebesar 3,74%, dari 1.117.911.000 ekor pada tahun 2023 menjadi 1.159.679.000 ekor pada tahun 2024. Sementara untuk target produksi benih ikan pada tahun 2024 sebesar 1.078.038.512 Ekor, sehingga pada tahun 2024 produksi benih ikan mencapai target (7,57%).

Produksi Balai Benih Ikan (BBI)

Produksi benih ikan BBI adalah kegiatan pembenihan dan budidaya ikan yang dilakukan di Balai Benih Ikan (BBI). BBI merupakan unit pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta yang bertugas menyediakan

benih ikan untuk pembudidaya ikan. Manfaat benih ikan BBI mendukung pembudidayaan ikan, Menghasilkan populasi ikan yang sehat dan berkualitas, Mempercepat pertumbuhan ikan dan meningkatkan produktivitas, Mengurangi tingkat mortalitas ikan yang tinggi. Adapun Produksi benih ikan tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 23. Produksi Benih Ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dibandingkan 2024.

Bulan	Komoditas	2023		2024	
		Hasil (Liter)	Jumlah (ekor)	Hasil (Liter)	Jumlah (ekor)
Januari	Nila		645.000	28,25	565.000
Februari	Nila		675.000	37,00	730.000
Maret	Nila		550.000	29,75	595.000
April	Nila		420.000	28,50	610.000
Mei	Nila		840.000	16,00	370.000
Juni	Nila		600.000	23,25	465.000
Juli	Nila		735.000	34,00	680.000
Agustus	Nila		470.000	41,00	770.000
September	Nila		290.000	27,50	550.000
Oktober	Nila		370.000	37,25	745.000
November	Nila		895.000	24,75	495.000
Desember	Nila		790.000	26,30	525.000
Jumlah			7.280.000	353,55	7.120.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) pada tahun 2024 sebesar 353,55 liter atau 7.120.000 ekor, hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,19%. Penurunan ini disebabkan oleh 3 faktor ;

1. Kondisi lingkungan yang relatif tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, dalam hal ini perubahan suhu dan kondisi kualitas

- air yang berubah secara signifikan akan berpengaruh kepada proses pemijahan dan kondisi dari induk ikan itu sendiri
2. Manajemen pakan, pemberian pakan ikan yang tidak tercukupi baik dari segi jumlah maupun kandungan serta kualitas dalam hal ini protei mempengaruhi kondisi induk dan kematangan gonad menjelang proses pemijahan
 3. Untuk hal lainnya seperti hama dan penyakit ikan memberikan dampak yang tidak signifikan namun sebagai bentuk evaluasi manajemen induk harus senantiasa diterapkan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk menjaga kestabilan produksi di UPTD Balai Benih ikan Cibogo girang

Dilihat dari capaian kinerja untuk UPTD Balai Benih Ikan (BBI) pada tahun 2024 sudah tercapai, dimana target kinerja tahun 2024 sebesar 6.740.000 Ekor (5,64%).

Produksi Ikan Hias

Ikan hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah suasana atau ruangan. Adapun jenis ikan hias yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Purwakarta adalah Ikan Koi dan Ikan Cupang. Ikan cupang banyak dibudidayakan karena banyak penggemarnya mulai anak-anak hingga dewasa. Berikut produksi ikan hias di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 24. Produksi Ikan Hias di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan 2024.

No	Jenis Ikan Hias (ekor)	Jumlah		Persentase kenaikan (%)
		2023	2024	
1	Cupang	117.210	117.270	0,05
2	Gupi	114.400	116.200	1,57
3	Koi	238.580	242.370	1,59
4	Komet	21.730	26.550	22,18
5	Manvis	17.550	17.450	-0,57
6	Mas Koki	14.230	14.340	0,77
Jumlah		523.700	534.180	2,00

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan produksi ikan hias sebesar 2,00%, dari 523.700 ekor pada tahun 2023 menjadi 534.180 ekor pada tahun 2024. Sedang untuk capaian target produksi ikan hias tahun 2024 sebesar 608.990 ekor, sehingga pada tahun 2024 capaian tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pelaku usaha budidaya ikan hias masih terbatas dan cenderung masih bersifat individual atau perseorangan belum banyak berkelompok. Sehingga perlu ditingkatkan kegiatan pembinaan dan diarahkan untuk berkelompok, agar memudahkan dalam pembinaan

Angka Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan atau lebih dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita per- tahun. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Nutrisi yang terkandung dalam ikan, yaitu asam lemak Omega-3, DHA dan EPA. Selain itu ikan juga memiliki sedikit lemak jenuh, protein yang tinggi, Vitamin D, Kalsium, Yodium dan berbagai nutrisi penting.

Rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia tentunya memiliki beberapa alasan. Penyebab rendahnya tingkat konsumsi ikan adalah terkait dengan masalah mitos dan budaya, sehingga sangat penting dilakukan pembinaan dan sosialisasi pentingnya konsumsi ikan. Pada tahun 2024 angka konsumsi ikan untuk Kabupaten Purwakarta sebesar 40,30 kg/kap, naik dari angka konsumsi ikan tahun 2023 sebesar 40,25 kg/kap. Sedangkan target untuk konsumsi ikan pada Renstra 2024-2026 sebesar 36,00 kg/kap/thn, sehingga dapat disimpulkan untuk indikator konsumsi ikan pada tahun 2024 sudah tercapai.

Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

(Allowable Catch) adalah jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari. (Maximum Sustainable Yield) perairan darat Kabupaten Purwakarta adalah 2.400 ton pertahun, jumlah produksi tangkap ikan tahun 2024 adalah 1.663,19 atau sekitar 69%, menunjukkan angka dibawah 80% jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan ini artinya penangkapan ikan di Kabupaten Purwakarta masih berkelanjutan dan berada dalam batasan biologis yang aman karena belum mengalami over fishing.

3) Sasaran 3 : Meningkatkan Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan adalah orang atau badan usaha yang mengelola kegiatan perikanan, mulai dari hulu sampai hilir. Pelaku usaha perikanan dapat berupa perorangan atau badan hukum yang dibentuk sesuai hukum Indonesia. Contoh

pelaku usaha perikanan yaitu nelayan, yaitu orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan.

RTP Penangkapan Ikan

RTP penangkapan ikan adalah rumah tangga yang melakukan penangkapan ikan untuk dijual sebagian atau seluruh hasilnya. Setiap anggota rumah tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP.

Tabel 25. Jumlah Rumah Tangga dan Nelayan di Kabupaten Purwakarta Menurut Jenis Alat Tangkap Tahun 2023 dibandingkan 2024

No	Jenis Perairan Darat	Jenis Alat Tangkap	Jumlah RTP		Jumlah Nelayan Buruh (Org)		Jumlah Nelayan (nelayan buruh +RTP) (Org)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Waduk	Jaring insang	920	920	0	0	920	920
		Perangkap (Bubu)	1	1	0	0	1	1
		Bagan tancap	0	25	0	0	0	25
		Jala Tebar	106	106	0	0	106	106
		Jaring insang	190	190	0	0	190	190
		Perangkap (Bubu)	20	20	0	0	20	20
		Jala Tebar	142	142	0	0	142	142
2	Sungai	Pancing	825	825	0	0	825	825
		Jaring insang	47	47	0	0	47	47
		Jala Tebar	52	52	0	0	52	52
		Pancing	168	168	0	0	168	168
		Anco	21	21	0	0	21	21
		Perangkap (Bubu)	14	0	0	0	14	0
		Jala Tebar	24	24	0	0	24	24
3.	Genangan air lainnya (Situ, Galian C dll)	Jaring insang	5	5	0	0	5	5
		Jala Tebar	38	69	0	0	38	69
		Pancing	257	257	0	0	257	257
		Anco	30	30	0	0	30	30
		Perangkap (Bubu)	20	3	0	0	20	3

RTP Pembudidayaan Ikan

RTP pembudidayaan ikan adalah jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Tabel 26. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Menurut Jenis Budidaya Tahun 2023 dibandingkan 2024

Jenis Budidaya		Jumlah		Persentase kenaikan(%)
		2023	2024	
Jaring Apung	Laut	0	0	0
	Tawar	3.158	3.158	0,00
	Tancap Tawar	0	0	0
Keramba Kolam	Air deras	6	8	33,33
	Air Tenang	3.152	3.150	-0,06
Jumlah		6.316	6.316	0,00

Tabel 27. Data Kelompok Perikanan Tahun 2023 dibandingkan 2024

No	Kelompok	Tahun 2023					Tahun 2024				
		P	L	M	U	Jml	P	L	M	U	Jml
1.	Pembudidaya ikan Mas	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
2.	Pembudidaya ikan Nila	49	0	1	1	51	50	0	1	1	52
3.	Pembudidaya ikan Lele	50	0	4	0	54	57	0	4	0	61
4.	Pembudidaya Gurame	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5.	Pembudidaya Patin	13	0	0	0	13	13	0	0	0	13
6.	Pembudidaya Ikan Hias	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
7.	KJA	17	0	0	0	17					
8.	Pengolah Ikan	111	0	0	0	111					
9.	Nelayan/ Penangkapan ikan	0	0	0	0	55	0	0	0	0	55
10.	POKMASWAS	0	6	0	0	6	0	0	0	0	5
Kelompok Perikanan		244	6	5	2	312					
TOTAL		338	10	7	2	412					

Keterangan :

P : Kelas Pemula

L : Kelas Lanjut

M : Kelas Madya

U : Kelas Utama

UPR : Unit Pembenihan Rakyat

Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Pengolahan ikan Adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa

ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan atau penampilan (appearance) sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya (value added) untuk memenuhi konsumsi manusia. Berdasarkan data pengukuran kinerja diatas, jumlah kelompok usaha pengolahan ikan pada tahun 2024 sudah mencapai target, dari target 14 kelompok terealisasi tahun 2024 sebanyak 16 kelompok usaha pengolahan ikan.

Produksi Olahan Produk Perikanan

Produksi olahan produk hasil perikanan pada tahun 2024 sebesar 450 ton sedangkan target kinerja sebesar 400 ton, dengan demikian indikator kinerja produksi olahan produk hasil perikanan pada tahun 2024 telah mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2024 produksi olahan produk hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar 12,50%.

Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator kinerja jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun 2024 mencapai 157 unit sedangkan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 130 unit, dengan demikian untuk indikator jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sudah mencapai target.

4) Sasaran 4 : *Meningkatnya Produksi Peternakan*

Produksi Peternakan

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik peternakan, jumlah populasi dan produksi hasil peternakan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Jumlah Produksi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2024 (kg)

No.	Jenis Produksi Ternak	Tahun 2023	Tahun 2024	Pertumbuhan (%)
A.	DAGING (kg)	84.546.876	37.318.987	-55,86
1.	Sapi Potong	1.344.438	1.379.368	2,60
2.	Kerbau	20.997	3.956	-81,16
3.	Domba	5.579.990	274.799	-95,08
4.	Kambing	185.826	37.808	-79,65
5.	Ayam Buras	1.299.488	784.477	-39,63
6.	Ayam Ras Petelur	727.202	144.275	-80,16
7.	Ayam Ras Pedaging	75.158.607	34.667.822	-53,87
8.	Itik	230.327	26.26.482	-88,50
B.	TELUR (kg)	13.498.419	5.608.158	-58,45
9.	Ayam Buras	2.714.024	3.623.282	33,50
10.	Ayam Ras Petelur	8.929.826	1.771.648	-80,16
11.	Itik	1.854.569	213.228	-88,50
C.	SUSU (kg)	0	0	0
12.	Susu sapi segar	0	0	0
	JUMLAH	98.045.295	48.535.302	-50,50

Produksi ternak ruminansia pada tahun 2024 semua komoditi mengalami penurunan, terutama produksi daging domba, kambing dan kerbau. Sedangkan produksi yang mengalami kenaikan yaitu daging sapi. Pada tahun 2024 produksi ternak mengalami penurunan disebabkan peralihan profesi dan sisa dampak pandemi covid-19.

Sementara itu faktor pemotongan juga berpengaruh terhadap produksi daging dimana dari total pemotongan ternak 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023. Demikian juga terjadi penurunan terhadap produksi telur, pada tahun 2024 produksi telur mengalami penurunan sebesar -141% persen dari 13.498.419 kg pada tahun 2023 turun menjadi 5.608.158 kg pada tahun 2024. Penurunan produksi telur ini disebabkan pengurangan kuota GP untuk setiap perusahaan.

Cakupan Akseptor IB

Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknologi tepat guna untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Adapun capaian kinerja IB yang telah dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Program Inseminasi Buatan Tahun 2023 dan 2024

No.	Capaian Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	R (%)
1.	Jumlah Akseptor (ekor)	2.305	2.232	
2.	Inseminasi (ekor)	2.340	2.315	
3.	Kebuntingan (ekor)	1.529	1.523	
4.	Kelahiran hasil IB dan kawin Alam (ekor)	2.189	1.859	
5.	S/C	1,53	1,51	
6.	CR	69	68,63	
7.	Jumlah kelahiran kawin Alam (ekor)		316	

Pada tahun 2024 jumlah akseptor Inseminasi Buatan (IB) mengalami penurunan dari 2.305 ekor menjadi 2.232 ekor. teknis operasional IB sapi potong menghasilkan kebuntingan sebanyak 1.523 ekor dengan kelahiran banyak 1.859 ekor, menurun dari tahun 2023 yaitu sebesar 2.189 ekor. Berdasarkan data tersebut di atas, pelaksanaan IB mengalami penurunan baik dari jumlah akseptor, Inseminasi, Kebuntingan dan kelahiran. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Purwakarta. Guna mengimbangi penurunan hasil pelaksanaan inseminasi buatan, maka peningkatan populasi ternak dijalankan melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Jumlah akseptor INKA tahun 2024 diperkirakan 631 ekor dengan estimasi jumlah kelahiran per tahun 316 ekor.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik peternakan, jumlah populasi hasil peternakan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 30. Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	Jenis Ternak	Tahun 2023 (ekor)	Tahun 2024 (ekor)	Pertumbuhan (%)
1.	Sapi Potong	13.901	10.066	-27,59
2.	Sapi Perah	0	0	0
3.	Kerbau	4.127	3.122	-24,35
4.	Domba	780.880	100.406	-87,14
5.	Kambing	192.430	14.961	-92,10
6.	Kuda	58	60	3,45
7.	Ayam Buras	1.265.402	763.900	-39,63
8.	Ayam Ras Petelur	780.880	154.924	-80,16
9.	Ayam Ras Pedaging	9.554.870	4.407.300	-53,87
10.	Itik	294.996	33.197	-88,75
	Kenaikan	12.887.550	5.487.936	-57,41

Tahun 2024 secara umum populasi ternak di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan sebesar -57,41%. Penurunan populasi ternak kerbau, domba dan kambing disebabkan banyak peternak yang beralih usaha ke usaha niaga, mengingat semakin terbatasnya lahan terbuka sebagai sumber hijauan pakan ternak.

Persentase bibit ternak bersertifikat (Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB)

Pada tahun 2024, penerbitan SKLB dilaksanakan setelah melalui tahapan sosialisasi ke peternak dan kelompok pembibit serta penetapan tim penilai pengawas produksi dan peredaran bibit ternak. Penerbitan SKLB dilakukan di wilayah pembibitan yaitu Kecamatan Campaka, Bungursari, Tegalwaru dan Cibatu. Jumlah ternak yang memenuhi syarat untuk mendapat SKLB sebanyak 55 ekor.

5) Sasaran ke-5 : Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Produksi Peternakan

Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Hasil capaian kinerja pada tahun 2024, tidak terdapat (nol) kasus penyakit hewan menular, hal ini didasarkan dari hasil pengujian laboratorium menunjuka *negatif*. Untuk penanggulangan kasus ini, telah dilaksanakan vaksinasi Anthrax, Rabies, Avian Influenza (AI) atau flu burung di beberapa wilayah rawan penyakit. Terjadinya kasus penyakit hewan menular akan menunjukkan status kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta, karena target utama sasaran ini adalah "*Purwakarta Bebas Flu Burung, Anthrax dan Rabies*".

Selain vaksinasi juga dilakukan pelayanan lainnya yaitu pencegahan dan pemberantasan Penyakit mulut dan kuku (PMK). Guna pencegahan masuknya Penyakit mulut dan kuku (PMK), maka Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan vaksinasi PMK yang meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Persentase Ternak yang Divaksin dari Populasi Wajib Suntik

Indikator persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik ditetapkan untuk melihat populasi ternak yang telah divaksin selama satu tahun dari populasi wajib suntik khusus di daerah endemis penyakit zoonosis (penyakit hewan atau ternak yang dapat menular ke manusia). Vaksinasi dilakukan dengan

tujuan untuk memicu respon tubuh ternak, dengan memasukkan agen penyebab penyakit dengan dosis tertentu, yang diharapkan mampu merangsang reaksi kekebalan yang akan meningkatkan system kekebalan hewan/ternak untuk bereaksi secara cepat dan efektif terhadap penyakit yang mungkin menyerang ternak di lapangan.

Pada tahun 2024 dilaksanakan vaksinasi Anthrak sebanyak 7.103 ekor, vakinasi AI sebanyak 68.270 ekor vaksinasi Rabies sebanyak 709 ekor dan vaksinasi PMK sebanyak 95.539 ekor, total hasil vaksinasi AI sebanyak 91.884 ekor. Sedangkan populasi wajib suntik pada tahun 2024 sebanyak 68.270 ekor sehingga di dapat persentase ternak yang divaksin dari total populasi wajib suntik sebesar 74,30% meningkat dari capaian tahun 2023 yaitu 72,40%.

Tabel 31. Data populasi ternak, populasi wajib suntik dan hasil vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	KECAMATAN	POPULASI WAJIB SUNTIK					HASIL VAKSINASI AVIAN INFLUENZA (AI)				
		AYAM	ITIK	ENTOK	LAIN-LAIN	JUMLAH	AYAM	ITIK	ENTOK	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	Darangdan	25340	2541	-	-	27.881	18.828	1.888	0	0	20.716
2	Bojong	22400	452	-	-	22.852	16.643	336	0	0	16.979
3	Wanayasa	18200	914	-	-	19.114	13.523	679	0	0	14.202
4	Kiarapedes	21350	687	-	-	22.037	15.863	510	0	0	16.373
JUMLAH		87.290	4.594		-	91.884	64.856	3.413	0	0	68.270

Tabel 32. Data Populasi Ternak, Populasi Wajib Suntik Dan Hasil Vaksinasi Anthrax Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	Kecamatan	Populasi Wajib Suntik					Hasil Vaksinasi Anthrax				
		Sapi	Kerbau	Domba	Kambing	Jumlah	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing	Jumlah
1	Babakancikao	547	503	1.305	974	3.329	406	374	970	724	2.474
2	Cibatu	291	65	1.257	853	2.466	216	48	934	634	1.832
3	Campaka	249	1	1.028	505	1.783	185	1	764	375	1.325
4	Bungursari	434	9	1.153	382	1.978	322	9	857	284	1.472
JUMLAH		1.521	578	4.743	2.714	9.556	1.129	432	3.525	2.017	7.103

Tabel 33. Rekapitulasi Vaksinasi Rabies di Purwakarta Tahun 2024

No.	Kecamatan	Anjing	Kucing	Monyet	Musang	Jumlah
1	Jatiluhur	7	15			22
2	Sukasari	9	12			21
3	Maniis	9	16			25
4	Tegalwaru	12	15			27
5	Plered	4	17			21
6	Sukatani	13	17			30
7	Darangdan	6	15			21
8	Bojong	9	16			25
9	Wanayasa	11	18			29
10	Kiarapedes	12	12	4	4	32
11	Pasawahan	6	11			17
12	Pondoksalam	6	10			16
13	Purwakarta	12	251	2		265
14	Babakancikao	12	52			64
15	Campaka	4	26	5		35
16	Cibatu	5	32			37
17	Bungursari	4	18			22
Jumlah		141	498	11	4	709

Tabel 20. Rekapitulasi Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Kecamatan	Domba	Kambing	Kerbau	Sapi	Total Vaksin
1	Babakancikao	2.846	36	2.601	9.167	14.650
2	Bojong	10.234	495	10	542	11.281
3	Bungursari	1.573	34	82	658	2.347

No	Kecamatan	Domba	Kambing	Kerbau	Sapi	Total Vaksin
4	Campaka	1.357	67	58	874	2.356
5	Cibatu	1.589	42	76	716	2.423
6	Darangdan	1.653	62	72	12.157	13.944
7	Jatiluhur	1.468	85	87	247	1.887
8	Kiarapedes	2.639	47	76	558	3.320
9	Maniis	1.258	26	14	475	1.773
10	Pasawahan	1.653	86	126	678	2.543
11	Plered	13.824	486	64	568	14.942
12	Pondoksalam	1.768	43	38	464	2.313
13	Purwakarta	1.634	84	58	596	2.372
14	Sukasari	1.461	31	35	271	1.798
15	Sukatani	1.683	48	44	436	2.211
16	Tegalwaru	1.371	254	84	531	2.240
17	Wanayasa	11.345	428	47	1.319	13.139
Jumlah		59.356	2.354	3.572	30.257	95.539

Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan

Pelaksanaan pengobatan selain dilaksanakan rutin tiap minggu bersamaan dengan kegiatan gempungan juga dilakukan secara dengan sistem *door to door* atau sesuai dengan permintaan peternak/masyarakat. Pada tahun 2024 ada beberapa penyakit ternak yang umum menyerang ternak di Kabupaten Purwakarta diantaranya ; Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Abses, Bovine Ephemeral Fever dan cacingan. Berdasarkan indikator kinerja pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengobatan penyakit ternak sebanyak 2.004 ekor turun dari tahun 2023 sebanyak 3.596 ekor dikarenakan kasus penyakit menurun.

Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan yang Ditangani Kesihatannya

Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2020. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat PUSKESWAN adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan.

Jumlah pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan tahun 2024 sebanyak 3.215 ekor menurun sekitar 6% dari tahun 2023 yaitu 5.069 kasus. Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan masih di dominasi penanganan pada kucing sebanyak 3.172 kasus. Sedangkan pelayanan kesehatan untuk anjing sebanyak 30 kasus, unggas 1 kasus dan hewan lainnya 12 kasus. Berdasarkan jenis penyakit yang ditangani di Puskeswan pada tahun 2024 sebanyak 2801 jenis, dengan didominasi penyakit Scabies, Earmites, Mycosis, Dermatitis.

Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)

Lalu-lintas diartikan pergerakan (*movement*) atau perpindahan (mutasi) suatu barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan alat angkut tertentu melalui tempat-tempat pengeluaran atau pemasukan. UPTD Pasar Hewan merupakan UPTD yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan

pengendalian keluar masuk ternak. Terhadap ternak yang masuk dilaksanakan pemeriksaan ulang dengan pengwasan di tempat jual beli ternak dan pemeriksaan pada saat ternak dibawa atau keluar dari pasar dengan mencatat tujuan kemana ternak tersebut dibawa. Kabupaten Purwakarta saat ini memiliki 1 (satu) buah pasar hewan ternak besar yang berlokasi di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao dan 3 buah pasar Hewan ternak Kecil yang masing- masing berlokasi di Kecamatan Plered, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa. Pasar Hewan di Kecamatan Babakan Cikao (Pasar Hewan Ciwareng) yang berdiri sejak tahun 1983 dan menjadi Unit Pelayanan Teknis Dinas atau (UPTD). Pada tahun 2024 untuk keluar masuk (lau lintas) ternak tercatat sebanyak 22.150 ekor, turun 58,79 persen dari tahun 2023 yaitu sebanyak 53.745 ekor, akan tetapi sudah mencapai target kinerja tahun 2024 yaitu sebanyak 20.000 ekor. Pemasukan ternak terdiri dari ternak sapi sebanyak 8.350 ekor, kerbau sebanyak 13.800 ekor, domba sebanyak 98.549 ekor dan ternak kambing sebanyak 2.554 ekor. Rincian pemasukan ternak dapat di lihat pada tabel 24 berikut.

Tabel 34. Jumlah Pemasukan Ternak (Lalu Lintas Ternak) Tahun 2024

No	Bulan	Jenis Ternak						Jumlah Pemasukan Ternak	Jumlah Ternak Yang Masuk Retribusi	
		Sapi	Kerbau	Domba Pasar Plered	Kambing Pasar Plered	Domba Pasar Wanayasa	Domba Pasar Bojong		Domba	Kambing
1	Januari	74	16	5.93	20	2.10	2.31	10.54	70	1.15
2	Februari	59	17	3.20	21	2.01	2.31	7.73	59	120
3	Maret	93	24	3.20	22	2.01	2.34	7.77	91	145
4	April	82	22	2.10	20	2.17	2.41	6.88	80	90
5	Mei	1.01	23	4.57	41	3.01	3.40	11.39	92	1.45
6	Juni	80	18	3.80	25	2.34	2.57	8.96	71	1.50

7	Juli	88	26	450	25	236	248	9.59	81	137
8	Agustus	52	17	3.00	13	1.44	1.68	6.25	50	90
9	September	76	23	3.40	20	2.24	2.48	8.32	71	107
10	Oktober	60	15	5.00	15	2.36	2.57	10.08	54	92
11	November	69	17	2.75	13	1.44	1.68	6.00	62	85
12	Desember	53	18	3.30	17	1.87	2.21	7.55	52	102
JUMLAH TOTAL		8.91	2.42	44.75	2.54	25.35	28.44	101.09	8.35	13.80

Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)

Kegiatan Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan.
- b. Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) baik di Pasar Tradisional maupun di Pasar Modern guna meningkatkan pengetahuan Hygiene dan Sanitasi Produk Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH), dan menerapkan pada tempat usahanya, dilaksanakan di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
- c. Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan (PAH)/Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) guna menjamin produk hewan yang diproduksi/diedarkan memenuhi persyaratan keamanan/mutunya, melindungi konsumen, mampu telusur (traceability); meningkatkan daya saing produk, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- d. Peningkatkan status hygiene dan sanitasi pada unit usaha hewan dan produk hewan, disamping untuk menyediakandata

dan informasi terkait tingkat keamanan produk hewan yang akan beredar dan akan dikonsumsi masyarakat

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2024. LAKIP didalamnya memuat tentang pencapaian sasaran kinerja, kemudian dievaluasi dan dianalisa hasil pencapaian tersebut, untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan sudah konsisten dengan Rencana Strategis (RENSTRA 2024-2026) dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran tahun 2024 dari 6 indikator sasaran yang diukur, sebanyak 100% mencapai target. Pencapaian indikator sasaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

I. Tujuan 1 terdapat 2 Indikator

- 1) Capaian SAKIP Perangkat Daerah
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Kedua indikator mencapai target, sehingga untuk tujuan III mencapai 33,33%. Dukungan anggaran untuk tujuan III sebesar Rp. 12.137.114.914,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.105.133.675,- atau 91,50%.

II. Tujuan II terdapat 2 Indikator Sasaran, yang terdiri dari :

- 1) Persentase peningkatan produksi perikanan
- 2) Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan dan persentase peningkatan pelaku usaha perikanan untuk tahun 2024 mencapai target, sehingga untuk tujuan I mencapai

33,33% dari 6 target sasaran. Dukungan anggaran untuk tujuan I sebesar Rp. 1.258.736.048,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.210.651.050,- atau 95,31%.

III. Tujuan I II terdapat 2 Indikator sasaran, terdiri dari

- 1) Meningkatnya produksi peternakan
- 2) Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat,

Kedua indikator sasaran mencapai target, sehingga untuk Tujuan II mencapai 33,33% dari 6 target sasaran. Dukungan anggaran untuk tujuan II sebesar Rp. 2.169.649.978,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.115.691.700,- atau 97,51%.

Dari hasil perhitungan capaian kinerja di atas, semua sasaran indikator yang di targetkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah mencapai target, atau dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100%. Dari 9 Program dan 77 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sudah seluruhnya mendukung indikator sasaran. Keberhasilan ini menjadi bahan evaluasi dan perencanaan ke depan, terutama dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran hendaknya memperhatikan sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA 2024-2026) yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi produksi ternak dan ikan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, sehingga dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja 2024. Prestasi ini membanggakan dan akan terus ditingkatkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja

tahun berikutnya. Terutama untuk kooditas unggulan seperti daging, telur, ikan nila dan ikan mas. Selain itu, kedepan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi ternak dan budidaya ikan akan ditambah guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan ikan sehingga akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Purwakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp. 49.650.000,- dan Retribusi Pasar Hewan sebesar Rp. 96.300.000,- serta Retribusi Penjualan Produksi Hasil perikanan Daerah, brupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp. 35.450.000,-, sehingga secara keseluruhan baru tercapai 49,76% dari total target yang ditetapkan. PAD Tahun 2024 untuk Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta ditargetkan sebesar Rp. 364.564.568,-, lebih tinggi dari target 2023 yaitu sebesar Rp. 322.264.950,-. Walaupun demikian capaian PAD tahun 2024 sebesar Rp. 181.400.000,- meningkat dari capaian PAD 2023 yaitu Rp. 144.326.000,-.

4.2. Saran

Saran atau rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan hasil dari evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a) Mempertahankan kualitas dokumen perencanaan selama (satu) tahun terakhir.

- b) Menyelaraskan Tujuan/Sasaran dalam dokumen Renstra dan RENJA dengan Dokumen RPJMD.
- c) Memantau kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik dengan memberikan *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a) Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formula perhitungan dan definisi operasional kinerja.
- b) Mempedomani pengukuran kinerja (individu dan organisasi) dalam pemberian *reward and punishment* serta penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.
- c) Mempedomani pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocusing) Organisasi, penyesuaian Strategi Organisasi, penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja, penyesuaian aktivitas dalam organisasi, penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerja untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.
- d) Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a) Mempertahankan kualitas dokumen pelaporan selama tahun terakhir.
- b) Menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dalam dokumen LAKIP
- c) Memanfaatkan informasi LAKIP sebagai perhatian utama pimpinan.
- d) Memanfaatkan informasi LAKIP sebagai acuan penyesuaian anggaran dan perubahan budaya kinerja pada organisasi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d) Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Terlepas dari segala kekurangan program dan kegiatan yang telah kami laksanakan selama tahun 2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini, semoga dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan perikanan dan peternakan kedepan.